

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BPKAD
PROVINSI JAWA BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Sarjana Ekonomi
Program Studi S1 Akuntansi**

DEWA AYU AGUNG MONICA AGUSTINE

NPM: C10160186



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS

BANDUNG

2020

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BPKAD PROVINSI
JAWA BARAT**

DEWA AYU AGUNG MONICA AGUSTINE

NPM: C10160186

Bandung, 02 September 2020

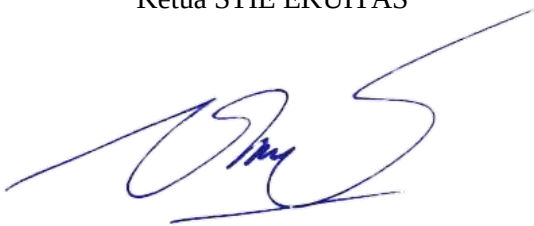
Pembimbing



Dr. H. Usdi Suryana, SE., MM., Ak., CA.

Mengetahui,

Ketua STIE EKUITAS



Prof. Dr. rer. nat. M. Fani Cahyandito, CSP.

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA.

Tanggung Jawab Yuridis ada pada penulis

PERNYATAAN
PROGRAM SARJANA

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, 26 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



(Dewa Ayu Agung Monica Agustine)

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BPKAD
PROVINSI JAWA BARAT**

Penulis:

Dewa Ayu Agung Monica Agustine

Pembimbing:

Dr. H. Usdi Suryana, SE., MM., Ak., CA.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat, baik secara parsial maupun simultan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dalam bentuk kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pada BPKAD Provinsi Jawa Barat. Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan sampel berjumlah 31 karyawan. Rancangan pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji analisis regresi linier berganda, uji analisis korelasi, uji analisis koefisien determinasi, uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan antara kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat pengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata kunci: Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

**THE EFFECT OF HUMAN RESOURCES QUALITY AND
IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS ON
THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORT IN
BPKAD WEST JAVA PROVINCE**

Written by:

Dewa Ayu Agung Monica Agustine

Preceptor:

Dr. H. Usdi Suryana, SE., MM., Ak., CA.

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of human resources quality and implementation of government accounting standards on the quality of local government financial report in BPKAD West Java Province, both partially and simultaneously using descriptive and verification method.

The data used in the research is primary data in the form of questionnaires. The population in this study were employees at BPKAD West Java Province. The sampling technique using purposive sampling with a sample of 31 employees. The hypothesis testing design used is classic assumption test, multiple linear regression analysis test, correlation analysis test, coefficient of determination analysis test partial test (t test), and simultaneous test (F test).

The result shows that there is no partially influence between human resources quality on the quality of local government financial report, while implementation of government accounting standards there is a significant effect on the quality of local government financial report. There was simultaneously a significant influence between human resources quality and implementation of government accounting standards on the quality of local government financial report.

Keywords: *Human resources quality, Implementation of government accounting standards and Quality of local government financial report*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia-Nya penulis diberikan semangat dan kesehatan sehingga dapat menjalani proses penyusunan dan penelitian tugas akhir ini dengan baik. Dan karena kekuasaan dan pertolongan-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat”** yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun agar dapat lebih baik lagi untuk kedepannya sehingga nantinya akan bermanfaat dan menjadi ilmu bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini begitu banyak hambatan serta rintangan yang dihadapi, namun berkat bantuan, baik moril maupun material, bimbingan serta doa dari berbagai pihak, penulis dapat mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Dewa K. Agung dan Ibu Ida I Dewa Ayu Sri yang selalu dan tiada hentinya memberikan do'a, semangat, motivasi, serta

dukungan, baik secara moril maupun material yang tidak ternilai harganya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.

2. Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, SE., M. Sc., CSP. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung.
3. Dr. Ir. Dani Dagustani, MM. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas.
4. Dr. Herry Achmad Buchory, SE., MM. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas.
5. Dr. Sudi Rahayu, SE., MM. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas.
6. Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas.
7. Hery Syaerul Homan, S.Pd., M.Pd. selaku Sekertaris Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas.
8. Ade Imam Muslim, S.Pd., S.Akt., M.Si. selaku dosen wali Akuntansi 5 (lima) yang senantiasa memberikan motivasi selama menjalani perkuliahan.
9. Dr. H. Usdi Suryana, SE., MM., Ak., CA. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi dan kritik yang membangun kepada penulis dari awal penentuan judul sampai terselesaikannya skripsi ini.
10. Seluruh dosen pengajar STIE Ekuitas yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
11. Seluruh jajaran staff STIE Ekuitas yang telah membantu penulis selama ini.

12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
13. DAA *squad* (Dewi, Trisca dan Febby) serta kakak saya (Dewa) yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi.
14. Tidak lupa juga kepada kedua keponakan penulis, Arka dan Giandra yang telah menjadi *moodbooster* saat penulis merasa sedih dan lelah.
15. Yuda Anggara Laksana yang selalu sabar memberikan perhatian dan semangat kepada penulis.
16. Diva Pratiwi selaku teman terdekat dan teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga saat ini, yang selalu ada dan memberikan saran serta dorongan kepada penulis.
17. Bella Silviani, Tiara Monita, Denna Siti dan Andini selaku teman-teman dari awal perkuliahan yang telah bersedia membantu memberi masukan dan semangat kepada penulis.
18. Ekuitas Voli Club (EVC), teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2016, khususnya Akuntansi 5 yang telah memberikan semangat dan banyak hal kepada penulis selama penyusunan skripsi.
19. Keluarga besar penulis, teman-teman di Bali dan sahabat SMA (Noviani, Zamzam dan Maudy) yang selalu memberikan do'a, semangat dan menghibur penulis.

20. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis, yang telah memberikan do'a, semangat dan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata semoga segala bantuan, semangat dan do'a dari semua pihak mendapatkan balasan dari Tuhan YME.

Bandung, 23 Juli 2020

Dewa Ayu Agung Monica Agustine

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	11
1.3.1 Maksud Penelitian	11
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian.....	12
1. Kegunaan Teoritis.....	12
2. Kegunaan Praktis	12
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	13
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	
PENELITIAN.....	14
2.1 Tinjauan Pustaka	14
2.1.1 Kualitas Sumber Daya Manusia.....	14
2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan.....	21
2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	30
2.1.4 Peneliti Terdahulu	36
2.2. Kerangka Pemikiran	38
2.2.1 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas	
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	39
2.2.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap	
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	40

2.2.3	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	41
2.3	Hipotesis Penelitian.....	43
BAB III.....		45
OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....		45
3.1	Objek Penelitian.....	45
3.1.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	45
3.1.2	Struktur Organisasi	46
3.2	Subjek Penelitian	47
3.3	Metode Penelitian	47
3.3.1	Metode yang Digunakan	48
3.3.2	Operasionalisasi Variabel Penelitian	48
3.4	Populasi dan Teknik Penentuan Sampel	52
3.4.1	Populasi.....	52
3.4.2	Teknik Penentuan Sampel	52
3.5	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	53
3.5.1	Sumber Data.....	53
3.5.2	Teknik Pengumpulan Data	54
3.5.3	Pengujian Validitas dan Reliabilitas	56
3.5.4	Metode Suksesif Interval (MSI).....	57
3.6	Analisis Regresi Linier Berganda.....	60
3.6.1	Analisis Koefisien Korelasi	61
3.6.2	Uji Koefisien Determinasi	62
3.6.3	Pengujian Hipotesis	62
BAB IV		66
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		66
4.1	Hasil Penelitian	66
4.1.1	Karakteristik Responden	66
4.1.2	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen.....	69
4.1.3	Metode Suksesif Interval (MSI).....	73
4.1.4	Gambaran Tanggapan Responden.....	74
4.1.5	Kualitas Sumber Daya Manusia pada BPKAD Provinsi Jawa Barat.....	74

4.1.6	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada BPKAD Provinsi Jawa Barat.....	76
4.1.7	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat.....	78
4.1.8	Uji Asumsi Klasik	80
4.1.9	Analisis Regresi Linier Berganda.....	85
4.1.10	Analisis Koefisien Korelasi	87
4.1.11	Analisis Koefisien Determinasi	89
4.1.12	Pengujian Hipotesis	90
4.2	Pembahasan.....	93
4.2.1	Kualitas Sumber Daya Manusia pada BPKAD Provinsi Jawa Barat.....	93
4.2.2	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada BPKAD Provinsi Jawa Barat.....	94
4.2.3	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat.....	96
4.2.4	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat.....	97
4.2.5	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat.....	98
4.2.6	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat.....	99
BAB V		101
KESIMPULAN DAN SARAN		101
5.1	Kesimpulan.....	101
5.2	Saran	102
DAFTAR PUSTAKA		104

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas Provinsi Jawa Barat	4
Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel	46
Tabel 3.2	Kriteria Persentase Skor Tanggapan Responden	52
Tabel 3.3	Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi	58
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	63
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	64
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	64
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	65
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Bekerja.....	65
Tabel 4.6	Uji Validitas Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia	66
Tabel 4.7	Uji Validitas Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	67
Tabel 4.8	Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	68
Tabel 4.9	Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia	69

Tabel 4.10	Uji Reliabilitas Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	70
Tabel 4.11	Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	70
Tabel 4.12	Kriteria Persentase Skor Tanggapan Responden	71
Tabel 4.13	Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia	72
Tabel 4.14	Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	73
Tabel 4.15	Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	75
Tabel 4.16	Uji Normalitas <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	77
Tabel 4.17	Uji Multikolinearitas	80
Tabel 4.18	Hasil Pengujian Koefisien Regresi Linear Berganda.....	82
Tabel 4.19	Hasil Uji Koefisien Korelasi.....	84
Tabel 4.20	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	85
Tabel 4.21	Hasil Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji t)	87
Tabel 4.22	Hasil Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F).....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan Opini Pemeriksaan LKPD	3
Gambar 2.1	Paradigma Penelitian	40
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	44
Gambar 3.2	Garis Kontinum	52
Gambar 4.1	Garis Kontinum Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia.....	73
Gambar 4.2	Garis Kontinum Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	75
Gambar 4.3	Garis Kontinum Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	77
Gambar 4.4	Normal P-P Plot Uji Normalitas.....	78
Gambar 4.5	Histogram Uji Normalitas	79
Gambar 4.6	Uji Heteroskedastisitas	82

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 *Photocopy* Surat Keputusan penetapan penyusunan dan penulisan skripsi
- Lampiran 2 Surat pengajuan judul skripsi
- Lampiran 3 Kuesioner penelitian
- Lampiran 4 Data excel kuesioner penelitian
- Lampiran 5 Hasil *output* SPSS versi 25
- Lampiran 6 r tabel
- Lampiran 7 t tabel
- Lampiran 8 F tabel
- Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik merupakan suatu bentuk keberhasilan perangkat negara dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan desentralisasi agar mampu menjalankan kebijakan pemerintah secara efisien diseluruh wilayah mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sehingga akan sulit menjalankan pemerintahan apabila tidak dilakukan desentralisasi, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas memaksa pemerintah untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang baik. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mencerminkan tata tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, pemerintah harus konsisten dalam melakukan perbaikan terhadap kualitas laporan keuangan. Perbaikan tersebut dapat dilihat dari semakin membaiknya opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. Bentuk hasil penilaian dari BPK terdiri dari 4 (empat) jenis opini yaitu:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3. Tidak Wajar (TW)
4. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

Hasil penilaian dari BPK disampaikan dalam bentuk opini dengan mempertimbangkan kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya untuk memberikan manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah dalam kepentingan pengambilan keputusan. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus memiliki karakteristik kualitatif yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik tersebut yakni (i) relevan, (ii) andal, (iii) dapat dibandingkan dan (iv) dapat dipahami.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 (IHPS I), dalam 5 (lima) tahun terakhir (2014-2018), opini LKPD mengalami perbaikan. Kenaikan opini tersebut terjadi pada pemerintah kabupaten dari 298 LKPD (72%) menjadi 327 LKPD (79%). Begitu pula pada pemerintah kota yang mengalami kenaikan dari 80 LKPD (86%) menjadi 84 LKPD (90%). Kenaikan tersebut terjadi antara lain karena pemda telah melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi

pada tahun-tahun sebelumnya sehingga akun-akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP. Sementara itu, terjadi penurunan opini WTP pada pemerintah provinsi dari 33 LKPD (97%) menjadi 32 LKPD (94%). Meskipun secara umum kualitas LKPD Tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan LKPD Tahun 2017, tetapi terdapat 15 dari 542 (3%) LKPD yang mengalami penurunan opini. Penurunan opini tersebut lebih banyak dibandingkan penurunan opini tahun 2017 sebanyak 14 dari 542 LKPD.



Gambar 1.1 Perkembangan Opini Pemeriksaan LKPD

Sumber: <https://bandung.bpk.go.id/>, diunduh 13 Februari 2020

Gambar 1.1 di atas menggambarkan perkembangan opini terhadap LKPD di Jawa Barat dari tahun 2011 - 2018. Terjadi peningkatan terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan penurunan terhadap opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Meskipun demikian, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kompetensi dalam menyajikan laporan

keuangan. Dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik.

Tabel 1.1
Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas Provinsi Jawa Barat

No.	Tahun Anggaran	Opini BPK
1	2011	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	2012	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: <https://bandung.bpk.go.id/>

Sesuai dengan Tabel 1.1 Jawa Barat merupakan Provinsi yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian 8 (delapan) kali beruntun dari tahun 2011 - 2018. Meskipun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan 3 (tiga) catatan penting. Menurut Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa, beberapa permasalahan tersebut diantaranya adalah pengelolaan kas di Bendahara Pengeluaran pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengelolaan kas itu masih tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan potensi penyalahgunaan kas oleh bendahara. Di kutip dari (<https://www.pikiran-rakyat.com/>, diunduh pada tanggal 25 Februari 2020).

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat, H.Daddy Rohanady mengapresiasi diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemprov Jabar TA 2018. Namun, Pemprov harus segera memperbaiki semua catatan dan temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutny, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK ditemukan selisih perhitungan antara BPK dan Pemprov Jabar mencapai Rp26 Miliar yang tersebar di sejumlah OPD. BPK sudah membuat Surat Keterangan Jaminan Mutlak (SKJM) yang sudah disetujui pihak-pihak terkait. Untuk itu, semua catatan harus segera memperbaiki selama 45 hari. Dikutip dari (<https://www.faktabandungraya.com/>, diunduh pada tanggal 2 Maret 2020).

Kepala perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa mengatakan BPK masih menemukan beberapa permasalahan atau catatan yang perlu mendapat perhatian meskipun hal temuan tersebut masih dalam batas toleransi. Ia pun membeberkan terkait catatan BPK diantaranya pengelolaan kas di bendahara pengeluaran pada OPD yang masih tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga berpotensi adanya penyalahgunaan kas oleh bendahara. Selanjutnya catatan mengenai pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur, terkait jalan pada Dinas Bina Marga. Adanya ketidak sesuaian ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran. Catatan ketiga terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak memadai dan catatan mengenai penatausahaan aset. Dikutip dari (<https://jabar.tribunnews.com/>, diunduh pada tanggal 5 September 2020).

Sesuai pemaparan hasil pemeriksaan BPK RI, terdapat catatan yang harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut Ineu Purwadewi

Sundari selaku Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, berdasarkan catatan tersebut maka DPRD Jawa Barat akan segera membahas menindak lanjuti hasil apapun yang menjadi catatan dari BPK RI kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia mengatakan hal tersebut harus menjadi pembelajaran dan perhatian bersama bahwa ke depan catatan-catatan tersebut tidak terulang kembali, sehingga Ia berharap di masa yang akan datang catatan WTP tidak terdapat catatan-catatan. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa mengatakan BPK masih menemukan beberapa permasalahan atau catatan yang perlu mendapat perhatian meskipun hal temuan tersebut masih dalam batas toleransi. Temuan tersebut terdiri dari temuan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan temuan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. (<https://www.ayobandung.com/read/2019>, diunduh pada tanggal 5 April 2020).

DPRD Jawa Barat mendesak sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar untuk menuntaskan persoalan selisih anggaran sebesar Rp26 miliar yang menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam LKPD Jabar Tahun Anggaran 2018. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar, Daddy Rohandi membeberkan secara spesifik temuan selisih anggaran sebesar Rp26 miliar tersebut terdapat di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) sebesar Rp20 miliar dan Rp6 Miliar lainnya di Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Permukiman dan Perumahan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar. Irfan Suryanegara selaku Wakil Ketua Banggar DPRD Jabar mengatakan BPK RI menemukan sejumlah pengerjaan proyek dan program OPD yang berpotensi menimbulkan kerugian negara akibat adanya perbedaan pandangan antara OPD dan BPK RI yang

menyebabkan terjadinya selisih perhitungan anggaran. Berdasarkan Rapat Banggar DPRD Jabar yang digelar Rabu 12 Juni 2019 kemarin, pihaknya meminta seluruh OPD yang menerima catatan BPK RI untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut dalam 45 hari ke depan. (<https://jabar.sindonews.com/>, diunduh pada 5 April 2020).

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa menilai akuntan mempunyai peran penting dalam pembukuan keuangan pemerintah daerah. Ia meminta daerah yang belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk menambah tenaga akuntan. Menurutnya langkah yang dilakukan Pemprov Jawa Barat dengan mempekerjakan puluhan akuntan untuk pembukuan keuangan patut dicontoh. Hasilnya sangat signifikan dengan raihan tujuh kali beruntun opini WTP dari BPK RI. Di kutip dari (<https://news.detik.com/>, diunduh pada tanggal 5 April 2020).

Berdasarkan IHPS I 2019, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 7.398 temuan yang memuat 12.117 permasalahan yang terdiri atas 5.858 permasalahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 6.259 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp2,19 triliun. Permasalahan kelemahan pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya terjadi pada 30 pemda, antara lain entitas terlambat menyampaikan laporan, serta system informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.

Permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian terjadi pada Pemprov Jawa Barat yaitu harga satuan timpang dan selisih/koreksi harga satuan atas pelaksanaan 7 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan pada

Dinas Bina Marga sebesar Rp15,53 miliar dimana proses perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan pada Dinas Bina Marga yang tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran. Kelebihan beyar itu terjadi pada 7 ruas jalan provinsi. Hal ini mengakibatkan terjadinya selisih perhitungan antara BPK RI dan Pemprov Jawa Barat. Ketidakpatuhan ini terjadi karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalai dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana Biaya Anggaran (RAB). Sumber daya manusia yang berkualitas mampu memahami dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi penyimpangan atau kemungkinan terjadinya kerugian negara.

Selain itu, bagian pekerjaan tidak lengkap/kurang/rusak atas pelaksanaan 6 paket pekerjaan pembangunan gedung, jalan dan jembatan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinkes, dan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang sebesar Rp1,80 miliar. Hal tersebut terjadi karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalai dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana Biaya Anggaran (RAB), serta tidak cermat dalam menetapkan HPS sesuai dengan harga yang wajar dan dalam melaksanakan kegiatan swakelola sesuai dengan ketentuan.

Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor pusat pengelolaan pendapatan daerah wilayah Kabupaten Sumedang tahap I dan peningkatan jalan Parungpanjang – Bunar yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada Pemprov Jawa Barat sebesar Rp2,63 miliar. Penyebab terjadinya permasalahan tersebut karena Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak cermat dalam mengawasi pelaksanaan maupun pembayaran honor kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Permasalahan lainnya yang ditemukan oleh BPK yaitu penyimpangan

administrasi sebanyak 2.258 permasalahan ditemukan pada 530 pemda, salah satunya pada Pemkab Purwakarta. Dimana terjadi permasalahan penyetoran penerimaan negara/daerah yaitu Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa pajak pada Puskesmas terlambat disetor ke Bendahara Penerimaan dan ke kas daerah. Penyimpangan administrasi terjadi karena kepala ODP kurang cermat dalam penentuan target retribusi dan kurang optimal dalam pengendalian terhadap penyetoran penerimaan dan petugas pemungut dan bendahara penerimaan kurang cermat dalam penyetoran penerimaan retribusi. (IHPS I 2019).

Selain kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), faktor lain yang mempengaruhi kualitas LKPD adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterapkan pada suatu daerah dalam menyusun laporan keuangannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP itu sendiri merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah ini merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Rahmawati, dkk : 2018).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, 99 dari 542 LKPD yang diperiksa memperoleh opini selain WTP, yaitu 86 WDP dan 13 TMP. LKPD Tahun 2018 belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup. Permasalahan tersebut dijumpai pada Pemkab Bandung Barat dalam akun piutang. Piutang lainnya dalam proses tuntutan ganti rugi dan piutang atas tuntutan ganti rugi yang belum disetor ke kas daerah yang telah dilengkapi dengan Surat

keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), tetapi tidak didukung dengan jaminan yang memadai. Permasalahan lainnya terdapat pada akun beban operasi – LO, dimana beban hibah untuk sarana dan prasarana SMP swasta tidak digunakan sesuai dengan pertanggungjawabannya pada Pemkab Cianjur. (IHPS I 2019).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Rifky Alamsyah, dkk (2017) yang menyatakan bahwa secara parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Penelitian Rahmawati, dkk (2018) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jawa Barat merupakan perangkat daerah yang mengelola dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Barat. Meskipun pengelolaan keuangan pada BPKAD Provinsi Jawa Barat sudah baik dengan didapatkannya opini WTP selama 8 kali berturut-turut, namun nyatanya dalam hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI, Pemprov Jawa Barat masih mendapatkan catatan-catatan penting yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kas dan kerugian negara sehingga harus segera ditangani dan diperbaiki.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah menjadi pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kualitas Sumber Daya Manusia pada BPKAD Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat?
4. Seberapa besar Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat baik secara parsial maupun simultan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data, dan solusi permasalahan mengenai pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kualitas Sumber Daya Manusia pada BPKAD Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada

BPKAD Provinsi Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui seberapa besar Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat baik secara parsial maupun simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan pengetahuan guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat meningkatkan ilmu dalam bidang ekonomi ataupun akuntansi yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai laporan keuangan Pemerintah, khususnya dalam pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akunasi Pemerintah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah mengenai pentingnya kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam pengelolaan Laporan Keuangan.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan sumber informasi, baik bagi pembaca maupun bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro No.22 Citarum, Kec. Bandung wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115.

Dan waktu penelitian dimulai sejak April 2020 sampai dengan Juli 2020 dengan melakukan pemberian kuesioner kepada pegawai yang BPKAD Provinsi Jawa Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kualitas Sumber Daya Manusia

2.1.1.1 Definisi Kualitas

Menurut Ismail (2018:2) kualitas atau mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat.

Sedangkan menurut Pandiangan (2019:31) kualitas adalah sebuah pencapaian yang telah dilalui secara keseluruhan yang telah dicapai melalui proses baik dan buruknya sebuah akhir hasil yang diinginkan.

Pengertian kualitas menurut Walujo, dkk (2020:4) yaitu: (1) pemenuhan/pemuasan keinginan konsumen; (2) kesesuaian terhadap standar/tolok ukur yang telah ditetapkan; dan (3) harga yang terjangkau (ekonomis).

Berdasarkan beberapa definisi kualitas yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi dari kualitas adalah suatu karakteristik, bentuk pencapaian, kesesuaian dan nilai dari suatu barang atau jasa yang dihasilkan.

2.1.1.2 Definisi Sumber Daya Manusia

Pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dibedakan antara pengertiannya secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah

maupun memperoleh pekerjaan. SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain-lain (Idris, 2016:65).

Menurut Samsuni (2017:113) Sumber Daya Manusia adalah penduduk yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan terhadap usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Susan (2019:954) Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai asset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Menurut Siahaan (2016:6) sumber daya manusia itu adalah tenaga atau kekuatan/kemampuan yang dimiliki oleh seorang berupa daya pikir, daya cipta, karsa dan karya yang masih tersimpan dalam dirinya sebagai energi potensial yang siap dikembangkan menjadi daya-daya berguna sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan definisi Sumber Daya Manusia (SDM) adalah suatu individu yang memiliki suatu kemampuan dan berfungsi sebagai aset yang dapat terus dikembangkan kemampuannya.

2.1.1.3 Definisi Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Ruhana (2012:53) kualitas sumber daya manusia pada dasarnya berkenaan dengan keahlian, kemampuan dan keterampilan kerja seseorang melakukan berbagai kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang ikut serta menentukan kualitas hidupnya.

Menurut Afrianti dalam Wardani dan Andriyani (2017) menyatakan kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah suatu karakteristik atau nilai yang dimiliki oleh individu manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan bekal pendidikan pelatihan dan pengalaman.

2.1.1.4 Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator kualitas atau mutu sumber daya manusia menurut Devy (2017:151) dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

a. Tingkat Kesehatan

Indikator tingkat Kesehatan penduduk:

1. Angka kematian. Angka kematian yang tinggi menunjukkan tingkat Kesehatan penduduk yang rendah.
2. Angka harapan hidup. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat Kesehatan penduduk yang baik.

Tingkat kesehatan penduduk tidak dapat dilepaskan dari pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan penduduk, pengeluaran untuk memperoleh pelayanan Kesehatan akan semakin tinggi. Penduduk yang pendapatannya tinggi dapat menikmati makanan yang berkualitas yang memenuhi standar kesehatan.

b. Tingkat Pendidikan

Orang yang tingkat pendidikannya tinggi diharapkan memiliki produktivitas yang tinggi jika dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah. Tingkat

pendidikan yang merupakan potensi sumber daya manusia yang unggul. Dalam bidang pendidikan, tinggi-rendahnya tingkat pendidikan masyarakat turut menentukan kualitas sumber daya masyarakat.

c. Pendapatan

Pendapatan yang tinggi sangat memengaruhi upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat di suatu negara. Tingkat pendapatan merupakan ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin baik kesejahteraan masyarakat suatu negara.

2.1.1.5 Aspek-aspek Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Idris (2016:67) kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut. Oleh sebab itu untuk kepentingan percepatan suatu pembangunan dibidang apapun, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu persyaratan utama. Kualitas sumber daya manusia ini menyangkut 2 (dua) aspek, yakni:

1. **Aspek fisik.** Untuk meningkatkan kealitas aspek fisik dapat diupayakan melalui program-program kesehatan dan gizi.
2. **Aspek nonfisik.** Sedangkan untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan-kemampuan nonfisik tersebut, maka upaya Pendidikan dan pelatihan adalah yang paling diperlukan.

Kedua aspek tersebut menyangkut kemampuan bekerja, berpikir dan keterampilan-keterampilan lain. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini juga dapat diarahkan kepada kedua aspek tersebut.

2.1.1.6 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi merupakan aset yang sangat berguna bagi organisasi. Akan tetapi, dengan perkembangan masa dan juga pertumbuhan organisasi yang dinamis potensi yang ada harus terus diasah dan ditingkatkan agar dapat mengikuti tuntutan dinamika lingkungan. Organisasi yang baik dan maju akan selalu peduli terhadap pengembangan potensi sumber daya manusianya. Pengembangan karyawan merupakan kunci bagi strategi bisnis yang didasarkan pada pengembangan modal intelektual, mengembangkan talenta manajerial, dan memberi kesempatan bagi anggota organisasi untuk bertanggung jawab atas kinerjanya sendiri. Di sisi lain, pengembangan ini juga merupakan komponen penting dalam suasana iklim ekonomi yang penuh persaingan untuk menjawab tantangan global dan perubahan sosial serta untuk memadukan antara kemajuan dan perubahan teknologi dalam desain pekerjaan.(Martoredjo, 2015:447)

Menurut Riniwati (2016:160) pengembangan sumber daya manusia mempunyai tujuan menghasilkan susunan kerja yang mampu membuat karyawan untuk lebih maju dalam mengembangkan keahlian dalam bentuk *softskill* maupun *hardskill*. Pengembangan ini bisa melalui Pendidikan, pelatihan, dan pembinaan. Prinsip dari program pengembangan adalah meningkatkan kualitas, mutu serta efektivitas dan efisiensi kerja dari para individu masing-masing karyawan beserta posisi dari pada jabatannya. Terdapat 2 (dua) jenis pengembangan, sebagai berikut:

1. **Pengembangan secara formal.** Sistem ini mengacu kepada pengembangan para karyawan diberikan suatu tugas perusahaan untuk mengikuti pendidikan dan latihan. Pendidikan dan pelatihan ini ada yang bersifat dari perusahaan

tempat kerja maupun pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh pihak lain. Pengembangan ini dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan pekerjaan pada saat ini maupun pada saat mendatang. Pengembangan ini bersifat pada diri sendiri atau secara personal. Dalam pelatihan maupun pendidikan memang sangat dibutuhkan dana yang tidak sedikit karena ini adalah harapan untuk mendapat keuntungan di masa depan. Sehingga banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk menggunakan sistem ini.

2. **Pengembangan secara informal.** Sistem ini mengacu kepada inisiatif karyawan yang ingin mengikuti pelatihan dan mengembangkan dirinya. Hal ini bisa dilakukan dengan mempelajari modul, buku sumber-sumber untuk bisa mempelajari korelasi antara pengembangan pribadi dengan pekerjaan atau posisinya. Pengembangan secara formal ini menjelaskan bahwa karyawan mempunyai inisiatif dan keinginan yang besar untuk meningkatkan mutu kuakitas dalam bekerja. Hal ini memang menguntungkan perusahaan dikarenakan perusahaan tidak mengeluarkan dana yang besar untuk meningkatkan kualitas dari pada karyawan. Hal ini juga sudah merupakan efisiensi tetapi juga meningkatkan produktivitas kerja yang semakin baik.

2.1.1.7 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Mardiasmo dalam Kurniawan (2019:161) kompetensi sumber daya manusia bidang akuntansi mengungkapkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi syarat tepat waktu agar

memenuhi kriteria laporan keuangan yang sudah relevan. Sumber daya manusia yang dimaksud disini secara khusus adalah aparat-aparat pemerintah yang memiliki pengetahuan yang cukup memadai dibidang akuntansi. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya yang mengerti akan prinsip-prinsip pelaporan keuangan, membuat kualitas laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang telah ditetapkan. (Yosefrinaldi, 2013:5).

Dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan adalah pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berlatar belakang akuntansi, serta didukung dengan keterampilan yang memadai dalam menyusun laporan keuangan, tekun dalam mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya dan memiliki pengalaman dalam bidang keuangan.

2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan

2.1.2.1 Definisi Standar

Menurut Rosalin (2017:108) *standard* mengandung arti ketentuan yang menjadi dasar acuan pokok sebagai berikut: (1) Sebagai pedoman untuk setiap anggota dalam mematuhi standar tersebut; (2) Sebagai hukum yang ditaati dengan kesepakatan bersama; dan (3) Maka dari itu yang perlu ditekankan adalah sifatnya mengikat.

Dari definisi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa standar merupakan batasan terhadap suatu aturan yang perlu ditaati dan bersifat mengikat bagi seluruh anggota dalam suatu organisasi.

2.1.2.2 Definisi Akuntansi

Berdasarkan PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pengertian Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Menurut Sohib (2018:2) akuntansi merupakan proses yang berupa urutan-urutan langkah yang harus dilalui oleh sebuah transaksi bisnis. Urut-urutan langkah yang diawali dengan adanya dokumen bisnis berupa bukti transaksi yang kemudian dicatat dalam jurnal dan diposting ke *ledger* sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan.

Dapat diambil kesimpulan bahwa akuntansi merupakan rangkaian kegiatan dalam mencatat kegiatan transaksi dan kejadian keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan.

2.1.2.3 Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan PP No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Sedangkan menurut Zeyn (2011:24) Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

Berdasarkan pemaparan mengenai definisi Standar Akuntansi Pemerintah, dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai

pedoman dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah dan memiliki kekuatan hukum.

2.1.2.4 Jenis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Adhi dan Suhardjo (2013:96) menyatakan:

“Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang *useful*. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP.”

Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP. SAP pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum SAP. Sedangkan SAP pada Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman SAP. Pedoman SAP tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tercantum dalam dua lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 tahun 2010 yaitu:

1. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.
2. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengikuti aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

2.1.2.5 Kandungan Standar Akuntansi Pemerintahan

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah telah menetapkan dua belas PSAP yang terdiri dari:

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan

informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. Transfer;
- d. Surplus/defisit-LRA;
- e. Penerimaan Pembiayaan;
- f. Pengeluaran Pembiayaan;
- g. Pembiayaan neto;
- h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas

Tujuan Pernyataan Standar Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi , pendanaan dan transitoris selama satu periode akuntansi.

4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan

Tujuan Pernyataan Standar Catatan atas Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam pengungkapan yang memadai, Catatasn atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

5. PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan mengungkapkan:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Perubahan pos investasi.

7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan;
- e. Retensi.

9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
 - c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - e. Perjanjian restrukturisasi utang;
 - f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
 - g. Biaya pinjaman;
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan
- Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
- Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*)

demikian meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional

Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan

kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

2.1.3.1 Definisi Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

Menurut Shatu (2016:162) kesimpulan dari pengertian Laporan Keuangan adalah: (1) Merupakan produk akuntansi yang penting dan dapat digunakan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi bagi pihak *internal* maupun pihak *eksternal* perusahaan; (2) Merupakan potret perusahaan, yaitu dapat menggambarkan kinerja keuangan maupun kinerja manajemen perusahaan, apakah dalam kondisi yang baik atau tidak; (3) Merupakan rangkaian aktivitas ekonomi perusahaan yang diklasifikasikan, pada periode tertentu; (4) Merupakan ringkasan dari suatu proses transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode yang bersangkutan.

Dari pemaparan teori mengenai laporan keuangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan produk yang dihasilkan dari proses akuntansi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada suatu

periode yang berguna dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan baik pihak internal maupun pihak eksternal.

2.1.3.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Entitas pelaporan terdiri dari:

1. Pemerintah pusat;
2. Pemerintah daerah;
3. Kementerian Negara/Lembaga; dan
4. Bendahara Umum Negara

2.1.3.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keuangan Pemerintah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah dihasilkan dari suatu Sistem Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah setidaknya terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya.

2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu asset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu kemudian di perbandingkan dengan periode sebelumnya.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

2.1.3.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. **Relevan.** Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya;
2. **Andal.** Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan;
3. **Dapat dibandingkan.** Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan

secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan;

- 4. Dapat dipahami.** Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.3.5 Penyusunan Laporan Keuangan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Menyusun Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah. Kemudian Laporan Keuangan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2.1.4 Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh penulis karena terdapat beberapa persamaan dan juga perbedaan. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan penulis, antara lain:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Astika Rahmawati, dkk (2018)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi standar akuntansi pemerintah, utilisasi teknologi informasi, dan system control intern secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
2.	Noprial Valenra Maksyur (2015)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan	Hasil penelitian baik secara parsial atau simultan menemukan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, system pengendalian internal, dan

		Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu)	pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
3.	Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo (2013)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintahan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tual)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian juga memberikan bukti bahwa Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
4.	Ida Ayu Enny Kiranayanti dan Ni Made Adi Erawati (2016)	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrua terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual

			mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5.	Merlyn C. T. Kalumata, dkk (2016)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Tekonologi Informasi, Reviu Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa teknologi informasi, tinjauan laporan keuangan dan sistem pengendalian internal memiliki dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran menurut Nurdin dan Hartati (2019:125) adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian pustaka. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel bebas yaitu Sumber Daya Manusia dan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) dengan variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2.1 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu karakteristik laporan keuangan adalah andal. Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila informasi yang terdapat pada laporan keuangan andal, yang berarti bebas dari pengertian yang menyesatkan penggunaannya, bebas dari kesalahan material, serta disajikan secara jujur sesuai fakta. Dalam hal ini, laporan keuangan yang andal berkaitan dengan sumber daya manusia yang menghasilkannya. Di sisi lain, sumber daya manusia yang berkualitas dapat berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu dalam menyajikannya. Sumber daya manusia sebagai pengelola laporan keuangan dituntut agar memiliki keahlian yang memadai dengan latar belakang akuntansi serta pengalaman dalam bidang keuangan. Selain itu juga memiliki kemauan atau daya juang untuk mengasah kemampuannya dengan cara belajar ataupun mengikuti program pelatihan, karena kualitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut sangat berperan dan berpengaruh dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Oleh sebab itu, maka pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan sebaik mungkin dan agar mampu berkontribusi dengan optimal.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maksyur (2015) menyatakan bahwa sumber daya manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan, ini berarti apabila sumber daya manusia dikelola dengan baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas sehingga pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan menjadi semakin baik pula.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan hipotesis pertama (H_1) adalah:

H_1 : Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.2.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan atau prinsip penyusunan laporan yang memiliki kekuatan hukum dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar laporan yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria kualitatif laporan keuangan. Apabila laporan keuangan telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan *useful* karena dapat memudahkan para pengguna laporan keuangan baik pengguna internal maupun pengguna eksternal untuk memahami isi dari laporan yang disajikan. Selain itu, laporan keuangan juga terbebas dari kesalahan yang bersifat material atau temuan lainnya saat diperiksa oleh BPK RI sehingga berpeluang besar mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Dengan diterapkannya SAP maka akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adhi dan Suhardjo (2013) menyatakan bahwa pengujian secara statistik memberikan bukti bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya bahwa ada pengaruh antara penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tual. Dari hasil penelitian memberikan

bukti bahwa dengan adanya kejelasan standar akuntansi pemerintahan yang dipakai, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Standar akuntansi pemerintahan menjadi acuan yang digunakan pegawai negeri sipil daerah (PNSD) Kota Tual dalam menyusun laporan keuangan pemerintah kota Tual.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan hipotesis kedua (H_2) adalah:

H_2 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.2.3 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada era modern seperti saat ini kualitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan dan perlu ditingkatkan guna menyesuaikan kemajuan zaman. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dengan mudah memahami penerapan SAP dalam menyusun laporan keuangan pada suatu instansi. Sehingga penyajian dan pelaporan dapat dilakukan dengan tepat waktu karena sumber daya yang mengerjakannya telah memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang akuntansi dan memiliki pengalaman di bidang keuangan. Selain itu dengan diterapkannya SAP dapat memudahkan dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan laporan keuangan yang disajikan pun dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin baik kualitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia dan diterapkannya SAP sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka kualitas laporan keuangan yang

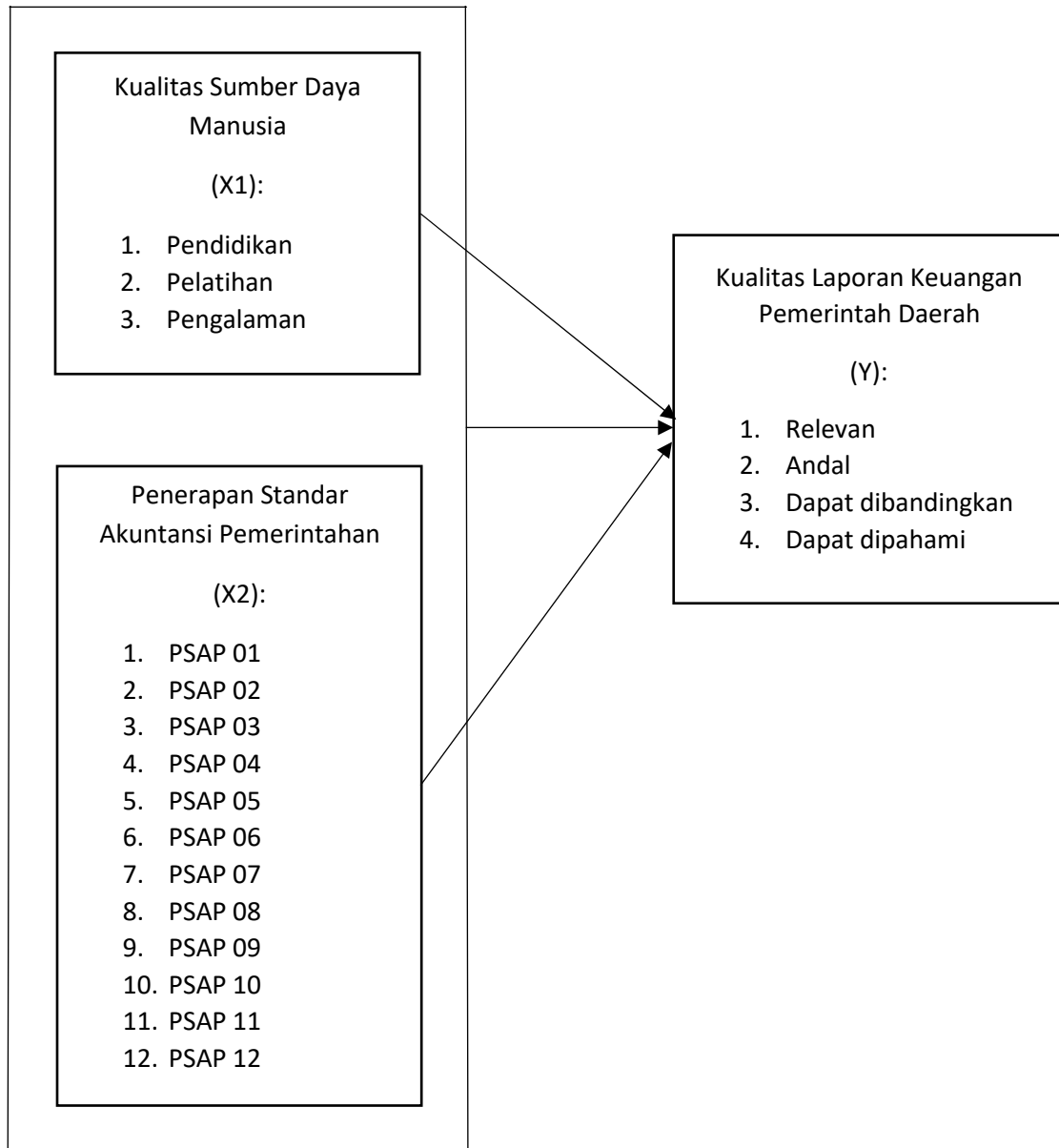
dihasilkan akan semakin baik dan berpeluang besar mendapatkan opini WTP dari BPK RI.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pujanira dan Taman (2017) menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Kompetensi Sumber Daya Manusia Penerapan dan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan akan semakin baik.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan hipotesis kedua (H_3) adalah:

H_3 : Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Paradigma penelitian untuk penelitian ini disusun sebagai berikut:



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

Sumber: Data diolah penulis, 2020

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sarmanu (2017:40) menyatakan hipotesis berasal dari kata hipo yang artinya lemah atau rendah, sedangkan tesis berarti pernyataan. Arti sederhana

hipotesis adalah pernyataan yang lemah, karena belum ada data dan belum diuji kebenarannya.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H2: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H3: Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek Penelitian menurut Fitrah dan Luthfiyah (2017:156) adalah dasar dari persoalan dan atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian yang kemudian hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kualitas sumber daya manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat berada di Jalan Diponegoro No.22, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No.79 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan serta pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Badan mempunyai fungsi:

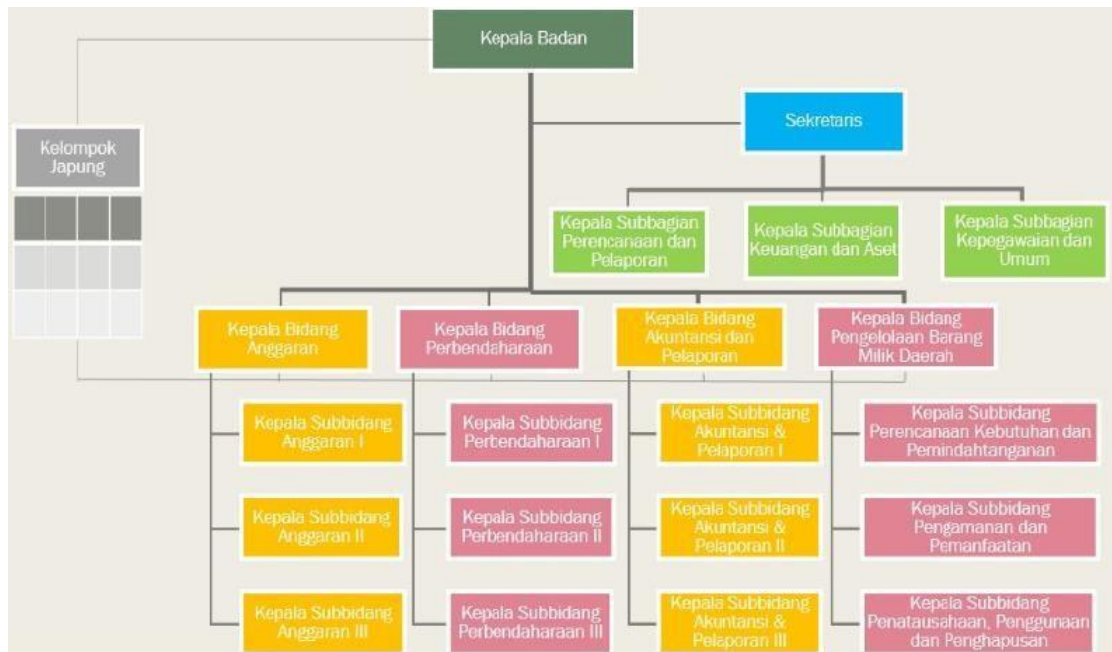
- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Badan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Melakukan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD);
3. Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TIPAD);
4. Sebagai Pejabat Penata Usahaan Barang Milik Daerah;
5. Evaluator APBD dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota;
6. Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan diantara fungsi, bagian atau posisi maupun orang-orang yang menunjukkan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. (Silviani, 2020:119).



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat

Sumber: bpkad.jabarprov.go.id/, diunduh 7 Mei 2020

3.2 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian menurut Anshori dan Iswati (2017:115) adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian dapat juga merupakan tempat di mana objek (variabel) berada atau melekat. Jika bicara tentang subjek penelitian, maka sebenarnya bicara tentang unit analisis, yakni subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.

Berdasarkan definisi diatas, subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat.

3.3 Metode Penelitian

Menurut Dawson dalam Anggito dan Setiawan (2018:32) metodologi atau metode penelitian, berisi penjelasan tentang metodologi dan metode penelitian yang dipilih.

Sedangkan menurut Sugiyono (2017:2) metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu penjelasan yang berisi cara ilmiah untuk memperoleh data dalam sebuah penelitian.

3.3.1 Metode yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode varifikatif. Menurut Tanjung dan Nababan (2016:39) metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual, dan akurat melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah mengenai gambaran dari masing-masing variabel yang diteliti yaitu kualitas sumber daya manusia (X1), penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X2), dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Sedangkan metode verifikatif menurut Kanita (2014:130) bertujuan menguji atau membuktikan adanya keterkaitan antara variabel-variabel yang diteliti dengan melakukan uji hipotesis melalui pengolahan dan pengujian data secara statistik. Pada penelitian ini metode verifikatif digunakan untuk menguji apakah kualitas sumber daya manusia (X1), penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X2) berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

3.3.2 Opersionalisasi Variabel Penelitian

Menurut Hermawan (2019:52) variabel penelitian adalah suatu atribut dan sifat atau nilai orang, faktor, perlakuan terhadap obyek atau kegiatan yang

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu kualitas Sumber Daya Manusia sebagai variabel independen kesatu, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai variabel independen kedua, dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berperan sebagai variabel dependen. Variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel independen

Menurut Forma dan Amanah (2018:7) variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia (X1) dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X2).

2. Variabel dependen

Menurut Forma dan Amanah (2018:7) variabel dependen merupakan variabel yang terikat dengan variabel independen atau variabel bebas. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Kualitas sumber daya manusia	Kemampuan sumber daya manusia untuk	1. Pendidikan 2. Pelatihan 3. Pengalaman	Ordinal

(X ₁)	melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. (Wardani dan Andriyani dalam Afrianti, 2011)	(Wardani dan Andriyani, 2017)	
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X ₂)	Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. (PP No.71 Tahun 2010)	1. (PSAP 01) Konsep Penyajian Laporan Keuangan 2. (PSAP 02) Konsep Laporan Ralisasi Anggaran 3. (PSAP 03) Konsep Laporan Arus Kas 4. (PSAP 04) Konsep Catatan Atas Laporan Keuangan 5. (PSAP 05) Konsep Akuntansi Persediaan	Ordinal

		6. (PSAP 06) Akuntansi Investasi 7. (PSAP 07) Konsep Akuntansi Aset Tetap 8. (PSAP 08) Konsep Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 9. (PSAP 09) Konsep Akuntansi Kewajiban 10. (PSAP 10) Konsep Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan 11. (PSAP 11) Konsep Laporan Keuangan Konsolidasian 12. (PSAP 12) Konsep Laporan Operasional (PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)	
--	--	--	--

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami (PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)	Ordinal
---	---	--	---------

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2020

Menurut Sekaran dan Bougie (2017:20) Skala ordinal (*ordinal scale*) tidak hanya mengategorikan variabel-variabel dalam suatu cara untuk menunjukkan perbedaan diantara berbagai kategori, tetapi juga mengurutkannya menjadi beberapa cara yang bermakna.

3.4 Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sekaran dan Bougie (2017:53) populasi (*population*) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik yang ingin peneliti investigasi. Populasi adalah kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik dimana peneliti ingin membuat opini (berdasarkan statistik sampel). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 145 orang.

3.4.2 Teknik Penentuan Sampel

Sampel (*sample*) adalah Sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, beberapa, namun

tidak semua, elemen populasi membentuk sampel. Sehingga, sampel adalah subkelompok atau sebagian dari populasi. Dengan mempelajari sampel, peneliti mampu menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terhadap populasi ketertarikan (yang diminati). (Sekaran dan Bougie, 2017:54).

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengambilan sampel dalam hal ini terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena mereka adalah satu-satunya pihak yang memilikinya, atau mereka memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Jenis pengambilan sampel ini disebut dengan pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*). (Sekaran dan Bougie, 2017:67). Kriteria anggota populasi yang menjadi sampel yaitu pegawai BPKAD yang tergolong berkecimpung atau terlibat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan kriteria tersebut didapatkan 31 responden dari subbidang Akuntansi dan Pelaporan dimana pada bidang ini merupakan pihak yang menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah, serta pegawai pada subbidang Perbendaharaan dimana pada bidang ini memiliki tugas menyajikan laporan arus kas yang merupakan bagian dalam laporan keuangan pemerintah.

3.5 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Sumber Data

Menurut Cahyono (2018:7) data menurut sumbernya yaitu (a) data primer; (b) data sekunder; (c) data tersier; dan (d) data kuarter. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan sendiri pengumpulannya (wawancara, angket, observasi, test, pengukuran)

terhadap obyek. Jadi data masih merupakan data mentah yang belum mengalami proses analisis. (Cahyono, 2018:7).

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan angket (kuesioner) kepada responden. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu survei studi deskriptif yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti dengan kepustakaan sebagai sumber utama. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. (Indra dan Cahyaningrum, 2019:26).

2. Kuesioner

Menurut Herlina (2019:1) kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan beberapa pertanyaan untuk diisi oleh responden yang selanjutnya dilakukan analisis sehingga diperoleh informasi.

Data yang telah terkumpul dari hasil kuesioner kemudian diolah dalam bentuk kuantitatif yaitu dengan cara menetapkan skor jawaban dari pertanyaan yang telah dijawab oleh responden, dimana setiap pertanyaan memiliki lima kemungkinan jawaban berdasarkan skala interval dengan menggunakan metode

likert. Menurut Sekaran dan Bougie (2017:19) skala likert (*likert scale*) adalah suatu skala yang dirancang untuk menelaah seberapa kuat subjek menyetujui suatu pernyataan.

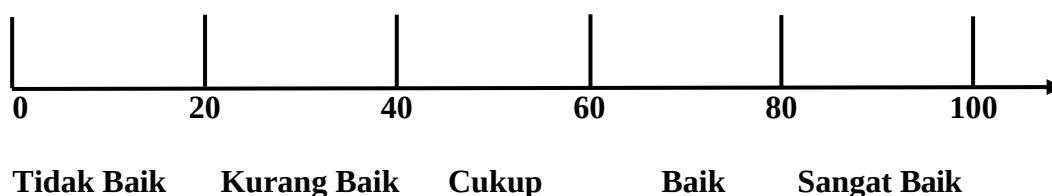
Menurut Herlina (2019:6) Skala Likert menggunakan beberapa butir pertanyaan untuk mengukur perilaku individu dengan merespon 5 titik pilihan pada setiap butir pertanyaan, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Skala Likert juga merupakan alat untuk mengukur atau mengumpulkan data dengan cara menjawab item butir-butir pertanyaan. Tidak ada masalah untuk memberikan angka 5 untuk yang tertinggi dan skor 1 untuk yang terendah atau sebaliknya. Yang penting adalah konsistensi dari arah sikap yang diperlihatkan. (Herlina, 2019:7).

Tabel 3.2 Kriteria Presentase Skor Tanggapan Responden

No	% Jumlah Skor	Kriteria
1	0% - 20%	Tidak Baik
2	21% - 40%	Kurang Baik
3	41% - 60%	Cukup
4	61% - 80%	Baik
5	81% - 100%	Sangat Baik

Sumber: Sugiyono, 2017:138



Gambar 3.2 Garis Kontinum

Sumber: Sugiyono, 2017:138

3.5.3 Pengujian Validitas dan Reliabilitas

3.5.3.1 Uji Validitas

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrument penelitian. Pengujian validitas itu mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dalam menjalankan fungsi. Instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Untuk perhitungan uji validitas dari sebuah instrumen dapat menggunakan rumus *korelasi product moment* atau dikenal juga dengan *korelasi pearson*. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut (Riyanto dan Hatmawan, 2020:63):

$$r = \frac{N \cdot \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{N \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{N \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi antara skor butir dan skor total

N = Jumlah subyek penelitian

$\sum x$ = Jumlah skor butir

$\sum y$ = Jumlah skor total

$\sum xy$ = Jumlah perkalian antara skor butir dengan skor total

$\sum x^2$ = Jumlah kuadrat skor butir

$\sum y^2$ = Jumlah kuadrat skor total

3.5.3.2 Uji Reliabilitas

Menurut Riyanto dan Hatmawan (2020:75) reliabilitas alat ukur adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam mengukur apa yang diukurnya. Artinya, kapan pun alat ukur tersebut digunakan akan memberikan hasil ukur yang sama.

Untuk pengajuan reliabilitas dapat mengacu pada nilai *Cronbach Alpha* (α), di mana suatu kosntruk atau variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki *Cronbach Alpha* (α) > 0,7 (Ghozali dalam Riyanto dan Hatmawan, 2020:75).

Rumus dari uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

$$r = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma t^2} \right)$$

Keterangan:

r = Reliabilitas instrumen

σt^2 = Varians total

k = Banyak butir pertanyaan atau bank soal

$\sum \sigma b^2$ = Jumlah variant butir

3.5.4 Metode Suksesif Interval (MSI)

Transformasi MSI adalah sebuah metode transformasi data ordinal menjadi data interval dengan mengubah proporsi kumulatif setiap peubah pada kategori menjadi nilai kurva normal bukunya. Dalam prosedur metode statistik seperti regresi liner, korelasi Pearson, uji t dan sebagainya mengharuskan data berskala interval. Oleh karena itu, jika kita hanya mempunyai data berskala ordinal; maka data tersebut harus diubah kedalam bentuk interval untuk memenuhi persyaratan prosedur-prosedur tersebut. Metode transformasi *method of successive interval*, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut (Ningsih dan Dukalang, 2019:45):

1. Menghitung frekuensi observasi untuk setiap kategori
2. Menghitung proporsi pada masing-masing kategori
3. Dari proporsi yang diperoleh, dihitung proporsi kumulatif untuk setiap kategori
4. Menghitung nilai Z (distribusi normal) dari proporsi kumulatif
5. Menentukan nilai batas Z (nilai *probability density function* pada absis Z) untuk setiap kategori, dengan rumus:

$$\delta(Z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{Z^2}{2}}, -\infty < Z < +\infty$$

Dengan $\pi = 3,14159$ dan $e = 2,71828$.

6. Menghitung *scale value* (interval rata-rata) untuk setiap kategori

$$Scale = \frac{kepadatan\ batas\ bawah - kepadatan\ batas\ atas}{daerah\ di\ bawah\ batas\ atas - daerah\ dibawah\ batas\ bawah}$$

7. Menghitung *score* (nilai hasil transformasi) untuk setiap kategori melalui persamaan:

$$score = scale\ Value + |scale\ Value_{min}| + 1$$

3.5.4.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik meliputi : (1) Uji Normalitas Data; (2) Uji Multikolinieritas; dan (3) Uji Heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah di dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data terdistribusi normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah terdapat distribusi normal atau tidak dalam model regresi maka digunakan analisis grafik dan uji statistik. Alat uji yang digunakan dengan analisis grafik *normal probability plot* dan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S). (Kumalasari dan Riduwan, 2018:9).

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik *normal probability plot* adalah (Ghozali dalam Kumalasari dan Riduwan, 2018:9):

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik hostogramnya tidak menunjukkan pola

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikorelasi adalah dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independent manakah yang dijelaskan oleh variabel independent lainnya. Nilai *tolerance* mengukur variabilitas variabel independent yang terpilih, yang tidak dijelaskan oleh variabel independent lainnya. (Ghozali dalam Kumalasari dan Riduwan, 2018:10).

Menurut Ghozali dalam Kumalasari dan Riduwan (2018:10) dasar pengambilan keputusan dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *Tolerance* di atas 0,1 dan nilai *VIF* dibawah 10, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut baik.
- 2) Jika nilai *Tolerance* dibawah 0,1 dan nilai *VIF* diatas 10, maka terjadi masalah multikorelasi, artinya model regresi tersebut tidak baik.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas akan dilakukan dengan melihat pola tertentu dalam grafik dengan dasar

analisis pengujian gejala heteroskedastisitas sebagai berikut (Ghozali dalam Kumalasari dan Riduwan, 2018:10):

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis regresi ini digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel dependen diasumsikan random/stokastik, yang berarti mempunyai distribusi probabilistik. Variabel dependen diasumsikan memiliki nilai tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang). (Ghozali dalam Kumalasari dan Riduwan, 2018:10).

Persamaan regresi untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

α = Nilai Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi untuk X_1

- β_2 = Koefisien Regresi untuk X_2
 X_1 = Kualitas sumber daya manusia
 X_2 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
 e = *error* (tingkat kesalahan penduga dalam penelitian)

3.6.1 Analisis Koefisien Korelasi

Analisis korelasi dapat didefinisikan sebagai metode statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Kata variabel sendiri dapat diartikan sebagai karakteristik dari objek yang diteliti. Pada analisis korelasi peneliti mengukur keeratan hubungan antara dua variabel saja tanpa memperhatikan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang mempengaruhi dan berapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Dari analisis korelasi yang dilakukan didapatkan suatu nilai yang disebut sebagai koefisien korelasi. Koefisien korelasi bisa bernilai positif atau negatif dan nilai koefisien berkisar antara -1 sampai dengan +1. Korelasi negatif ditunjukkan dengan koefisien korelasi yang bernilai negatif begitu juga sebaliknya korelasi positif ditunjukkan dengan koefisien korelasi yang bernilai positif. (Astuti, 2017:4).

Tabel 3.3 Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi

Besar Koefisien Korelasi (Positif atau Negatif)	Interpretasi Koefisien Korelasi
0,00	Tidak Ada Korelasi
0,01 – 0,20	Korelasi sangat lemah
0,21 – 0,40	Korelasi Lemah
0,41 – 0,70	Korelasi Sedang
0,71 – 0,99	Korelasi Tinggi
1,00	Korelasi Sempurna

Sumber: Astuti (2017:5)

3.6.2 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang amat terbatas. Penilaian dalam pengujian koefisien determinasi adalah apabila model regresi memiliki R^2 yang mendekati satu, maka hasil uji tersebut mengindikasikan korelasi yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen. Namun jika R^2 mendekati angka nol, berarti terdapat korelasi yang lemah antara variabel dependen dengan variabel independen, yang mengindikasikan bahwa variabel independen tidak mampu untuk menjelaskan variabel dependen dengan baik. (Kumalasari dan Riduwan, 2018:10).

3.6.3 Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menunjukkan ada tidaknya pengaruh kualitas sumber daya manusia (X_1) dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_2) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

3.6.3.1 Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Ghozali dalam Chairunnisa, dkk (2020:7) menyatakan bahwa uji t statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan.

Menurut Ghozali dalam Kumalasari dan Riduwan (2018:11) pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi hubungan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan

menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Jika tingkat signifikansi $t > 0,05$ maka H_a ditolak, H_0 diterima. Maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika tingkat signifikansi $t < 0,05$ maka H_a diterima, H_0 ditolak. Maka secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Langkah-langkah melakukan Uji t adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan hipotesa statistik

H_0 : Kualitas sumber daya manusia (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

H_a : Kualitas sumber daya manusia (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

H_0 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

H_a : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

- 2) Menentukan nilai kritis (t_{tabel})

Dipilih *level of significant* (α) = 5% (0,05)

Derajat bebas pembagi (df) = $n - k - 1$

- 3) Menghitung nilai statistic t (t_{hitung}) dapat dicari dengan menggunakan rumus:

$$t = \frac{bi}{SE(bi)}$$

Dimana:

b_i = Koefisien regresi

SE (b_i) = *standard error* koefisien regresi

4) Kriteria perhitungan

H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$

H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$

3.6.3.2 Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali dalam Chairunnisa, dkk (2020:7) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Kumalasari dan Riduwan (2018:11) menyatakan bahwa uji kelayakan model yang menunjukkan apakah model regresi *fit* untuk diolah lebih lanjut. Uji kelayakan model pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam suatu model penelitian berpengaruh secara signifikan. Dalam penelitian ini model regresi dapat dikatakan *fit* atau layak uji apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan uji kelayakan model adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai $F > 0,05$ maka model penelitian dikatakan tidak layak.
- 2) Jika nilai $F < 0,05$ maka model penelitian dapat dikatakan layak (*fit*).

Langkah-langkah melakukan Uji F adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan hipotesa statistik

H_0 : Kualitas sumber daya manusia (X_1) dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (Y).

H_a : Kualitas sumber daya manusia (X_1) dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

2) Menentukan nilai kritis (F_{tabel})

Dipilih *leve; of significant* (α) = 5% (0,05)

Derajat bebas pembilang (dfl) = k

Derajat bebas pembagi (df) = n – k – 1

3) Menghitung nilai statistic (F_{hitung}) dapat dicari dengan menggunakan rumus:

$$F_h = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan:

R = Koefisien korelasi berganda

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

4) Kriteria perhitungan

H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$

H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan gambaran atau deskripsi mengenai pengaruh kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penyebaran kuesioner ditujukan kepada BPKAD Provinsi Jawa Barat. Penyebaran kuesioner ditujukan kepada bagian akuntansi dan pelaporan serta bagian perbendaharaan dengan jumlah responden sebanyak 31 responden.

4.1.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dimaksudkan untuk mengidentifikasi responden. Data responden yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini sebanyak 31 responden. Responden merupakan beberapa karyawan pada Instansi Pemerintahan pada bagian akuntansi dan pelaporan, dan bidang perbendaharaan. Adapun gambaran umum responden disajikan sebagai berikut:

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Pria	17	54,8%
Wanita	14	45,2 %
Jumlah	31	100%

Sumber: Kuesioner (Hasil Pengolahan Data Primer)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada BPKAD Provinsi Jawa Barat mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pria sebanyak 17 responden dengan nilai persentase

sebesar 54,8%, sedangkan responden berjenis kelamin wanita sebanyak 14 responden dengan nilai persentase sebesar 45,2%.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia (tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
20 - 30	12	38,7%
31 – 40	11	35,5%
41 – 50	4	12,9%
51 - 60	4	12,9%
Jumlah	31	100%

Sumber: Kuesioner (Hasil Pengolahan Data Primer)

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden berdasarkan usia pada BPKAD Provinsi Jawa Barat mayoritas responden berusia 20-30 tahun sebanyak 12 responden dengan nilai persentase sebesar 38,7%. Sedangkan minoritas responden pada penelitian ini adalah berusia 41-50 tahun dan 51-60 tahun yang masing-masing berjumlah 4 responden dengan nilai persentase 12,9%.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
SMA/Sederajat	0	0%
Diploma/Akademi	2	6,5%
S1	22	71%
S2	7	22,5%
S3	0	0%
Jumlah	31	100%

Sumber: Kuesioner (Hasil Pengolahan Data Primer)

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir pada BPKAD Provinsi Jawa Barat mayoritas responden dalam penelitian ini adalah Strata 1 (S1) sebanyak 22 responden dengan nilai persentase 71%. Untuk Strata 2 (S2) sebanyak 7 responden dengan nilai responden 22,5%. Sedangkan minoritas responden berdasarkan pendidikan terakhir dalam penelitian ini adalah Diploma/Akademi sebanyak 2 responden dengan nilai persentase 6,5%.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Latar Belakang Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
Akuntansi	22	71%
Non-Akuntansi	9	29%
Jumlah	31	100%

Sumber: Kuesioner (Hasil Pengolahan Data Primer)

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden berdasarkan latar belakang pendidikan pada BPKAD Provinsi Jawa Barat mayoritas responden berlatar belakang pendidikan akuntansi sebanyak 22 responden dengan nilai persentase 71%. Sedangkan minoritas responden berdasarkan latar belakang pendidikan dalam penelitian ini adalah non-akuntansi sebanyak 9 responden dengan nilai persentase 29%.

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Bekerja

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Bekerja

Masa Bekerja (tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
1 - 10	19	61,3%
11 - 20	8	25,8%

21 - 30	3	9,7%
>30	1	3,2%
Jumlah	31	100%

Sumber: Kuesioner (Hasil Pengolahan Data Primer)

Berdasarkan Table 4.5 dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden berdasarkan masa bekerja pada BPKAD Provinsi Jawa Barat mayoritas responden memiliki masa bekerja 1-10 tahun sebanyak 19 responden dengan nilai persentase 61,3%. Sedangkan minoritas responden berdasarkan masa bekerja dalam penelitian ini yaitu dengan masa bekerja lebih dari 30 tahun sebanyak 1 responden dengan nilai persentase 3,2%.

4.1.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen

a. Uji Validitas

Pengujian validitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Selain itu pengujian validitas bertujuan untuk mengetahui apakah pertanyaan yang tersedia pada kuesioner dapat mengukur variabel yang telah ada. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan uji korelasi *Product Moment Pearson* menggunakan IBM SPSS versi 25. Pengujian ini dilakukan dengan mengkorelasikan skor jawaban responden dari setiap item pertanyaan. Nilai r tabel untuk $n = 31$ dengan taraf signifikansi dan derajat keabsahan 0,05, hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 4.6 Uji Validitas Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia

Butir Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X1(1)	0,819	0,355	Valid
X1(2)	0,768	0,355	Valid

X1(3)	0,724	0,355	Valid
X1(4)	0,702	0,355	Valid
X1(5)	0,501	0,355	Valid
X1(6)	0,792	0,355	Valid
X1(7)	0,769	0,355	Valid
X1(8)	0,636	0,355	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan hasil uji validitas yang disajikan dalam Tabel 4.6 menggunakan *software* SPSS versi 25, dapat dilihat bahwa seluruh instrumen penelitian yang digunakan memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, sehingga seluruh instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas sumber daya manusia dinyatakan valid.

Tabel 4.7 Uji Validitas Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Butir Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X2(1)	0,575	0,355	Valid
X2(2)	0,685	0,355	Valid
X2(3)	0,743	0,355	Valid
X2(4)	0,668	0,355	Valid
X2(5)	0,808	0,355	Valid
X2(6)	0,662	0,355	Valid
X2(7)	0,602	0,355	Valid
X2(8)	0,730	0,355	Valid
X2(9)	0,710	0,355	Valid
X2(10)	0,661	0,355	Valid
X2(11)	0,625	0,355	Valid
X2(12)	0,589	0,355	Valid
X2(13)	0,632	0,355	Valid

X2(14)	0,699	0,355	Valid
X2(15)	0,689	0,355	Valid
X2(16)	0,766	0,355	Valid
X2(17)	0,808	0,355	Valid
X2(18)	0,598	0,355	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan hasil uji validitas yang disajikan dalam Tabel 4.7 menggunakan *software* SPSS versi 25, dapat dilihat bahwa seluruh instrumen penelitian yang digunakan memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, sehingga seluruh instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan valid.

**Tabel 4.8 Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah**

Butir Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Y1	0,613	0,355	Valid
Y2	0,612	0,355	Valid
Y3	0,640	0,355	Valid
Y4	0,791	0,355	Valid
Y5	0,532	0,355	Valid
Y6	0,781	0,355	Valid
Y7	0,627	0,355	Valid
Y8	0,580	0,355	Valid
Y9	0,549	0,355	Valid
Y10	0,747	0,355	Valid
Y11	0,543	0,355	Valid
Y12	0,801	0,355	Valid
Y13	0,772	0,355	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan hasil uji validitas yang disajikan dalam Tabel 4.8 menggunakan *software* SPSS versi 25, dapat dilihat bahwa seluruh instrumen penelitian yang digunakan memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, sehingga seluruh instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian validitas, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan metode *Cronbach Alpha*. Perhitungan keandalan alat ukur dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 25. Hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,863	8

Sumber: Pengolahan Data SPSS versi 25

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa variabel kualitas Sumber Daya Manusia memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,863. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner penelitian adalah reliabel karena memiliki *cronbach's alpha* lebih dari 0,7 dengan demikian dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini.

Tabel 4.10 Uji Reliabilitas Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,932	18

Sumber: Pengolahan Data SPSS versi 25

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,932. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner penelitian adalah reliabel karena memiliki *cronbach's alpha* lebih dari 0,7 dengan demikian dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini.

Tabel 4.11 Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,892	13

Sumber: Pengolahan Data SPSS versi 25

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa variabel kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,892. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner penelitian adalah reliabel karena memiliki *cronbach's alpha* lebih dari 0,7 dengan demikian dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini.

4.1.3 Metode Suksesif Interval (MSI)

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan kuesioner. Hasil yang diperoleh dari penyebaran kuesioner ini merupakan data

ordinal, maka untuk melakukan pengujian selanjutnya diperlukan data interval. Karena itu data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner perlu diubah menjadi data interval dengan menggunakan data interval. Hasil dari transformasi data ordinal menjadi data interval tersebut disajikan pada data terlampir.

4.1.4 Gambaran Tanggapan Responden

Untuk dapat memudahkan penelitian dari jawaban responden, maka disusun kriteria penelitian sebagai berikut:

Sangat Setuju (SS) : diberi bobot 5

Setuju (S) : diberi bobot 4

Netral (N) : diberi bobot 3

Tidak Setuju (TS) : diberi bobot 2

Sangat Tidak Setuju (STS) : diberi bobot 1

Tabel 4.12 Kriteria Persentase Skor Tanggapan Responden

No.	% Jumlah Skor	Kriteria
1	0% - 20%	Tidak Baik
2	Diatas 20% - 40%	Kurang Baik
3	Diatas 40% - 60%	Cukup
4	Diatas 60% - 80%	Baik
5	Diatas 80% - 100%	Sangat Baik

Sumber: Sugiyono, 2017:138

4.1.5 Kualitas Sumber Daya Manusia pada BPKAD Provinsi Jawa Barat

Kualitas Sumber Daya Manusia diukur dari 8 pertanyaan. Untuk mengetahui rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden mengenai kualitas Sumber Daya Manusia secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.13 Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Terhadap
Kualitas Sumber Daya Manusia**

Item Pertanyaan	Frekuensi Tanggapan					Jumlah	Indeks Skor Aktual
	SS	S	N	TS	STS		
X1(1)	70	52	12	0	0	31	134
X1(2)	65	60	9	0	0	31	134
X1(3)	65	52	12	2	0	31	131
X1(4)	85	48	6	0	0	31	139
X1(5)	75	60	3	0	0	31	138
X1(6)	55	72	6	0	0	31	133
X1(7)	55	40	27	2	0	31	124
X1(8)	55	44	24	0	1	31	124
SKOR YANG DIPEROLEH							1057

Sumber: Kuesioner Penelitian

Untuk memberikan interpretasi terhadap skor yang diperoleh, maka dilakukan pengkategorian dengan cara sebagai berikut:

Indeks skor maksimum = bobot tertinggi x jumlah pertanyaan x n

$$= 5 \times 8 \times 31$$

$$= 1240$$

Indeks skor minimum = bobot terendah x jumlah pertanyaan x n

$$= 1 \times 8 \times 31$$

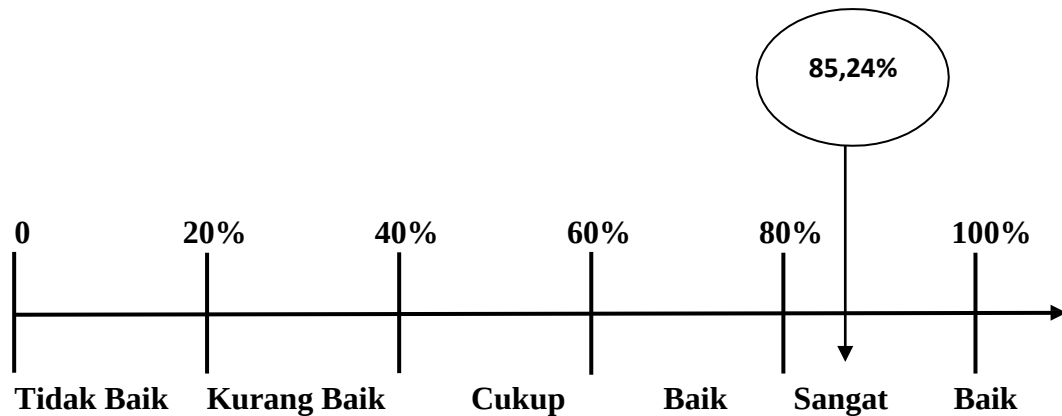
$$= 248$$

Presentase skor = (Total skor yang diperoleh : Indeks skor maksimum) x

$$100\%$$

$$= (1057 : 1240) \times 100\%$$

$$= 0,8524 \text{ menjadi } 85,24\%$$



Gambar 4.1 Garis Kontinum Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, skor yang diperoleh sebesar 1057 dari skor ideal 1240 (85,24%). Hal ini dapat dilihat dari Gambar 4.1 pada garis kontinum yang menunjukkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia pada BPKAD Provinsi Jawa Barat berada pada kriteria sangat baik. Informasi tersebut mengidentifikasi bahwa secara umum kualitas Sumber Daya Manusia pada BPKAD Provinsi Jawa Barat sudah sangat baik.

4.1.6 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada BPKAD Provinsi Jawa Barat

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diukur dari 18 pertanyaan. Untuk mengetahui rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14 Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Item Pertanyaan	Frekuensi Tanggapan					Jumlah	Indeks Skor Aktual
	SS	S	N	TS	STS		
X2(1)	65	60	9	0	0	31	134
X2(2)	70	52	12	0	0	31	134
X2(3)	50	72	9	0	0	31	131
X2(4)	80	48	9	0	0	31	137

X2(5)	50	64	15	0	0	31	129
X2(6)	65	60	9	0	0	31	134
X2(7)	70	60	6	0	0	31	136
X2(8)	55	72	6	0	0	31	133
X2(9)	50	72	9	0	0	31	131
X2(10)	50	68	12	0	0	31	130
X2(11)	65	68	3	0	0	31	136
X2(12)	55	76	3	0	0	31	134
X2(13)	65	64	6	0	0	31	135
X2(14)	55	64	12	0	0	31	131
X2(15)	55	68	9	0	0	31	132
X2(16)	45	68	15	0	0	31	128
X2(17)	60	60	12	0	0	31	132
X2(18)	65	68	3	0	0	31	136
SKOR YANG DIPEROLEH							2393

Sumber: Kuesioner Penelitian

Untuk memberikan interpretasi terhadap skor yang diperoleh, maka dilakukan pengkategorian dengan cara sebagai berikut:

Indeks skor maksimum = bobot tertinggi x jumlah pertanyaan x n

$$= 5 \times 18 \times 31$$

$$= 2790$$

Indeks skor minimum = bobot terendah x jumlah pertanyaan x n

$$= 1 \times 18 \times 31$$

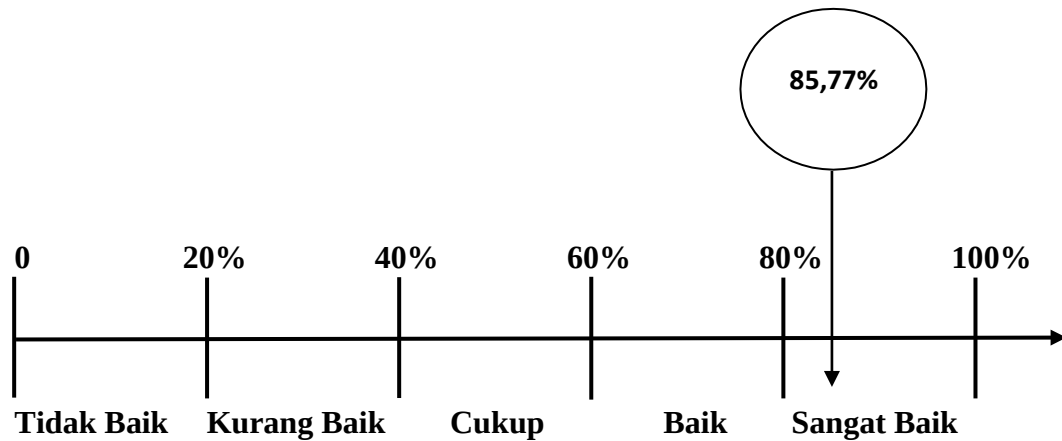
$$= 558$$

Presentase skor = (Total skor yang diperoleh : Indeks skor maksimum) x

$$100\%$$

$$= (2393 : 2790) \times 100\%$$

$$= 0,8577 \text{ menjadi } 85,77\%$$



Gambar 4.2 Garis Kontinum Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, skor yang diperoleh sebesar 2393 dari skor ideal 2790 (85,77%). Hal ini dapat dilihat dari Gambar 4.2 pada garis kontinum yang menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada BPKAD Provinsi Jawa Barat berada pada kriteria sangat baik. Informasi tersebut mengidentifikasikan bahwa secara umum penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada BPKAD Provinsi Jawa Barat sudah diterapkan dengan sangat baik.

4.1.7 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD

Provinsi Jawa Barat

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diukur dari 13 pertanyaan. Untuk mengetahui rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden mengenai kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15 Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Item Pertanyaan	Frekuensi Tanggapan					Jumlah	Indeks Skor Aktual
	SS	S	N	TS	STS		
Y(1)	95	44	0	2	0	31	141

Y(2)	40	88	3	0	0	31	131
Y(3)	50	52	24	0	0	31	126
Y(4)	85	52	3	0	0	31	140
Y(5)	55	56	15	2	0	31	128
Y(6)	75	56	6	0	0	31	137
Y(7)	90	44	6	0	0	31	140
Y(8)	40	76	12	0	0	31	128
Y(9)	90	44	6	0	0	31	140
Y(10)	80	48	9	0	0	31	137
Y(11)	85	44	9	0	0	31	138
Y(12)	85	44	9	0	0	31	138
Y(13)	50	60	18	0	0	31	128
SKOR YANG DIPEROLEH							1752

Sumber: Kuesioner Penelitian

Untuk memberikan interpretasi terhadap skor yang diperoleh, maka dilakukan pengkategorian dengan cara sebagai berikut:

Indeks skor maksimum = bobot tertinggi x jumlah pertanyaan x n

$$= 5 \times 13 \times 31$$

$$= 2015$$

Indeks skor minimum = bobot terendah x jumlah pertanyaan x n

$$= 1 \times 13 \times 31$$

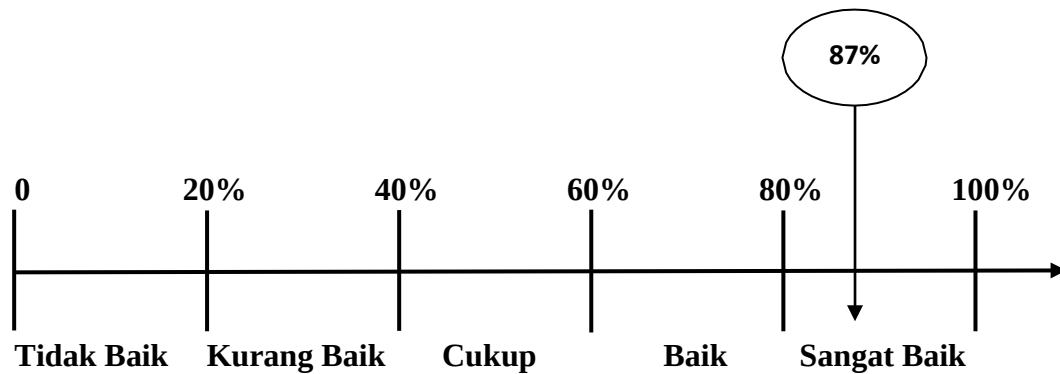
$$= 403$$

Presentase skor = (Total skor yang diperoleh : Indeks skor maksimum) x

$$100\%$$

$$= (1752 : 2015) \times 100\%$$

$$= 0,87 \text{ menjadi } 87\%$$



Gambar 4.3 Garis Kontinum Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, skor yang diperoleh sebesar 1752 dari skor ideal 2015 (87%). Hal ini dapat dilihat dari Gambar 4.3 pada garis kontinum yang menunjukkan bahwa kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat berada pada kriteria sangat baik. Informasi tersebut mengidentifikasikan bahwa secara umum kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat sudah sangat baik.

4.1.8 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov Test*. Perhitungan uji normalitas menggunakan SPSS Versi 25 dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.16 Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

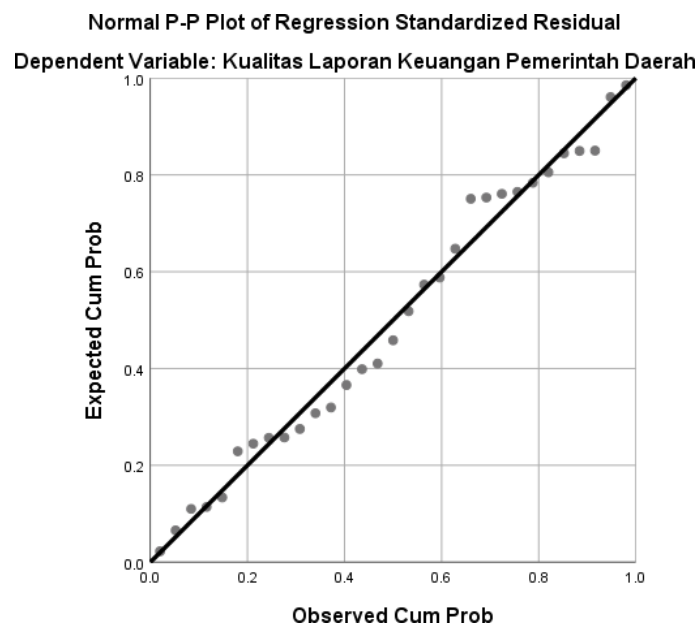
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.05198818

Most Extreme Differences	Absolute	.113
	Positive	.077
	Negative	-.113
Test Statistic		.113
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 25

Dari hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* pada tabel 4.16 diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (*Asymp, Sig, 2-tailed*) sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa nilai residual telah berdistribusi secara normal, karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05 ($0,200 > 0,05$).

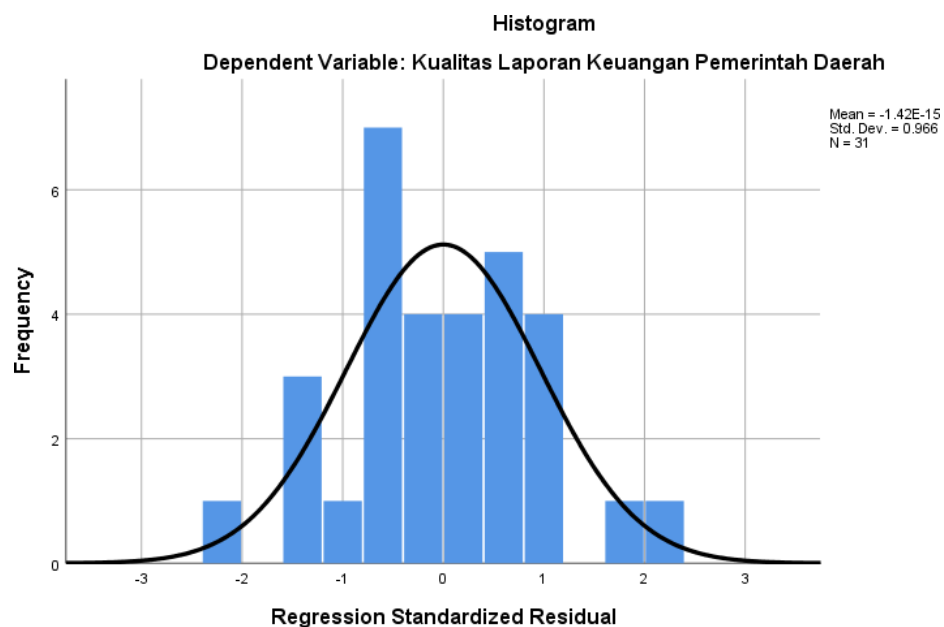
Uji normalitas selanjutnya dapat diketahui dengan menggunakan grafik normal plot serta histogram dari residualnya. Berikut ini merupakan hasil uji normalitas dengan *probability* dan grafik histogram:



Gambar 4.4 Normal P-P Plot Uji Normalitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 25

Penyebaran distribusi data dapat dilihat menggunakan grafik *P-P Plot*. Dalam uji normalitas menggunakan *P-P Plot*, suatu data dapat dikatakan berdistribusi normal ketika data menyebar disekitar garis diagonal. Berdasarkan Gambar 4.4 diatas, dilihat dari grafik *P-P Plot*, kesamaan antara nilai probabilitas harapan dan probabilitas pengamatan menunjukkan garis diagonal yang merupakan perpotongan antara garis probabilitas harapan dan probabilitas pengamatan. Nilai *P-Plot* terletak disekitar garis diagonal, sehingga bisa diartikan bahwa distribusi data adalah normal.



Gambar 4.5 Histogram Uji Normalitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 25

Pada uji normalitas yang menggunakan histogram, suatu data dapat dikatakan terdistribusi normal ketika grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal. Berdasarkan Gambar 4.5 diatas, grafik histogram menunjukkan bahwa grafik histogram pola distribusi tidak melenceng ke kiri maupun ke kanan. Dalam hal ini data menyebar di sekitar garis diagonal atau mengikuti arah diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear dalam variabel independen dalam model, dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen. Untuk mengetahui suatu model regresi bebas dari multikolinearitas, maka nilai VIF harus kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* harus lebih dari 0,10.

Tabel 4.17 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.482	4.003		2.119	.043		
	Kualitas Sumber Daya Manusia	.399	.206	.287	1.938	.063	.530	1.888
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	.391	.097	.597	4.033	.000	.530	1.888

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 25

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.17 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari variabel kualitas Sumber Daya Manusia adalah 0,530 dan variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 0,530. Sedangkan nilai VIF untuk variabel kualitas Sumber Daya Manusia adalah 1,888 dan variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 1,888. Dilihat dari hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari setiap variabel > 0,1

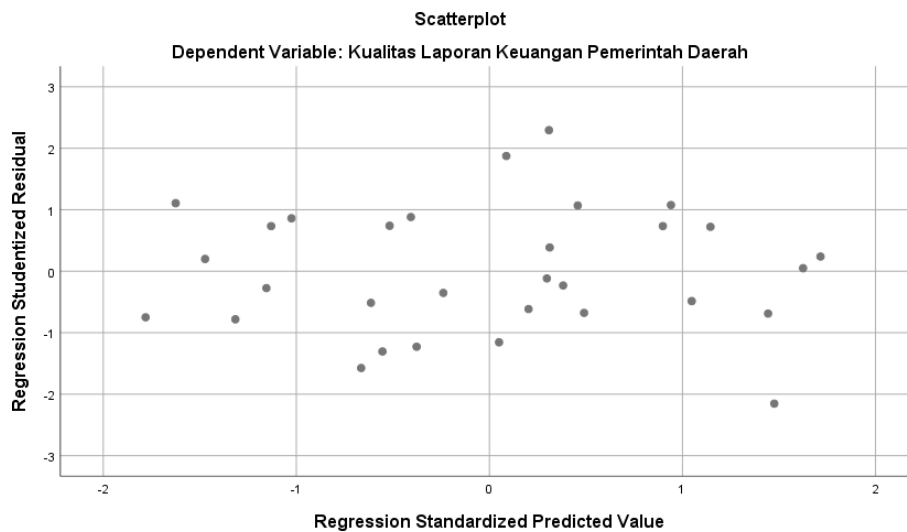
serta nilai VIF dari setiap variabel $< 10,00$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model regresi dalam penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas. Sedangkan jika varians berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas.

Untuk menguji heteroskedastisitas, cara yang sering digunakan dalam menentukan apakah suatu model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau tidak, hanya dengan melihat *scatter plot* dan lihat apakah residual memiliki pola tertentu atau tidak. Dasar pengambilan keputusan untuk *scatter plot* yaitu:

- 3) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 4) Jika tidak ada pola jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.6 Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 25

Gambar 4.6 menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan metode grafik *scatter plot*. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas, karena titik-titik yang diperoleh membentuk pola acak tidak beraturan serta menyebar diatas dan dibawah angka nol (0) pada sumbu Y.

4.1.9 Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi linear berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- α = Nilai Konstanta
- β_1 = Koefisien Regresi untuk X_1
- β_2 = Koefisien Regresi untuk X_2
- X_1 = Kualitas sumber daya manusia
- X_2 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
- e = *error* (tingkat kesalahan penduga dalam penelitian)

Dengan menggunakan *software* SPSS versi 25, diperoleh hasil estimasi regresi linear berganda sebagai berikut:

Tabel 4.18 Hasil Pengujian Koefisien Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.482	4.003		2.119	.043		
	Kualitas Sumber Daya Manusia	.399	.206	.287	1.938	.063	.530	1.888
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	.391	.097	.597	4.033	.000	.530	1.888
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah								

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 25

Tabel 4.18 memberikan informasi mengenai hasil estimasi regresi linear berganda antara kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dapat dilihat bahwa nilai konstanta (α) yang diperoleh adalah sebesar 8,482 dengan nilai koefisien regresi (β_1) sebesar 0,399, dan (β_2) sebesar 0,391. Persamaan linear yang terbentuk dari hasil estimasi diatas adalah sebagai berikut:

$$Y = 8,482 + 0,399X_1 + 0,391X_2$$

Pada persamaan regresi linear berganda diatas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi yang diperoleh bertanda positif, artinya semakin baik persepsi kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan akan berdampak pada meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah dan begitu juga sebaliknya. Pada persamaan di atas juga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

α = Konstanta sebesar 8,482 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) adalah sebesar 8,482.

β_1 = Koefisien variabel kualitas Sumber Daya Manusia (X_1) memiliki nilai sebesar 0,399. Hal ini berarti bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebesar 1% akan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat sebesar 0,399.

β_2 = Koefisien penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_2) memiliki nilai sebesar 0,391. Hal ini berarti bahwa peningkatan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 1% akan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat sebesar 0,391.

4.1.10 Analisis Koefisien Korelasi

Analisis Koefisien Korelasi digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antar variabel kualitas Sumber Daya Manusia (X_1) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), dan juga variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_2) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Jika terdapat hubungan, maka seberapa besar pengaruhnya. Untuk memberikan interpretasi terhadap nilai korelasi yang diperoleh, peneliti mengacu pada pedoman interpretasi koefisien korelasi seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Korelasi

Correlations				
		Kualitas Sumber Daya Manusia	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kualitas Sumber Daya Manusia	Pearson Correlation	1	.686**	.697**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	31	31	31
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	Pearson Correlation	.686**	1	.794**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	31	31	31
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pearson Correlation	.697**	.794**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	31	31	31
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).				

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 25

Berdasarkan Tabel 4.19 dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (R) antara kualitas Sumber Daya Manusia dengan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 0,697 atau 69,7% yang berarti bahwa terdapat hubungan sedang, karena pada interval 0,41 – 0,70 (dengan korelasi sedang). Selanjutnya hubungan antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 0,794 atau 79,4% yang berarti bahwa terdapat hubungan tinggi, karena pada interval 0,71 – 0,99 (dengan korelasi tinggi). Sedangkan untuk signifikansi antara kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki signifikansi sebesar 0,000 atau < 0,05, maka hubungan variabel X_1 dan X_2 terhadap Y signifikan.

4.1.11 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (r^2) merupakan nilai yang menunjukkan besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dinyatakan dalam bentuk persen (%). Dengan menggunakan *software* SPSS versi 25, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.821 ^a	.674	.651	4.194
a. Predictors: (Constant), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Sumber Daya Manusia				
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 25

Berdasarkan Tabel 4.20 dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (R) secara simultan adalah sebesar 0,821. Pada tabel diatas juga menunjukkan R-square sebesar 0,674. R-square juga dikenal dengan nama koefisien determinasi (KD). Nilai koefisien determinasi dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

$$= (0,821)^2 \times 100\%$$

$$= 0,674$$

Nilai KD sebesar 0,674 atau 67,4% menunjukkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh simultan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan

sisanya sebesar 32,6% ($100 - 67,4$) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.

4.1.12 Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Pengaruh secara Parsial (Uji t)

Uji statistic t atau uji parsial pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen (kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan) secara individual terhadap variabel dependen (kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang diuji dengan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- 3) Jika tingkat signifikansi $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak. Maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 4) Jika tingkat signifikansi $t < 0,05$ maka hipotesis diterima. Maka secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dengan menggunakan *software* SPSS versi 25, maka hasil uji t dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21 Hasil Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.482	4.003		2.119	.043
	Kualitas Sumber Daya Manusia	.399	.206	.287	1.938	.063

	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	.391	.097	.597	4.033	.000
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 25

1. Pengujian Hipotesis Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil pengolahan data pada Tabel 4.21 menunjukkan bahwa t_{hitung} yang diperoleh untuk variabel kualitas Sumber Daya Manusia sebesar 1,938. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t. Dengan $(\alpha) = 0,05$, $df = n-k-1$ maka $df = 31-2-1 = 28$, untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,048. Dikarenakan $t_{tabel} > t_{hitung}$ ($2,048 > 1,938$) dengan nilai signifikansi $0,063 > 0,05$ maka H_a ditolak, H_0 diterima. Artinya kualitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat.

2. Pengujian Hipotesis Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil pengolahan data pada Tabel 4.21 menunjukkan bahwa t_{hitung} yang diperoleh untuk variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 4,033. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t. Dengan $(\alpha) = 0,05$, $df = n-k-1$ maka $df = 31-2-1 = 28$, untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,048. Dikarenakan $t_{tabel} < t_{hitung}$ ($2,048 < 4,033$) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak, H_a diterima. Artinya penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat.

b. Pengujian Pengaruh secara Simultan (Uji F)

Pengujian secara simultan (Uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_0 : kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H_a : kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tingkat signifikan (α) sebesar 5% dengan menggunakan *software* SPSS versi 25, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.22 Hasil Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1020.570	2	510.285	29.008	.000 ^b
	Residual	492.558	28	17.591		
	Total	1513.128	30			
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						
b. Predictors: (Constant), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Sumber Daya Manusia						

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 25

Tabel 4.22 menunjukkan hasil pengujian simultan antara variabel kualitas Sumber Daya Manusia (X_1) dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_2) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% dan jumlah $n = 31$ serta jumlah variabel bebas (k) = 2. Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui jika penyebut = $(n - (k + 1)) = (31 - (2 + 1)) = 28$, dengan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa F_{tabel} sebesar 3,34, dan diketahui bahwa F_{hitung} adalah sebesar $29,008 > F_{tabel} \ 3,34$, maka artinya H_a diterima. Selain itu juga dilihat dari perbandingan probabilitas dengan tingkat signifikansi 5%, menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari signifikansi sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Kualitas Sumber Daya Manusia pada BPKAD Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap variabel kualitas Sumber Daya Manusia (X_1), diperoleh hasil sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan jawaban responden atas variabel X_1 yang didominasi dengan jawaban “sangat setuju (SS)”, maka diperoleh kesimpulan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia dikategorikan sangat kuat berdasarkan garis kontinum. Hal ini berarti Sumber Daya Manusia pada BPKAD Provinsi Jawa Barat memiliki kualitas yang sangat baik. Kualitas Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 indikator yaitu pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang disusun dalam 8 pertanyaan.

Jika dilihat dari jawaban responden, untuk beberapa pertanyaan masih terdapat jawaban yang netral, tidak setuju dan bahkan sangat tidak setuju pada pertanyaan variabel kualitas Sumber Daya Manusia, artinya meskipun kualitas Sumber Daya Manusia yang ditunjukkan oleh BPKAD Provinsi Jawa Barat tergolong dalam kategori sangat baik, namun kualitas Sumber Daya Manusia masih perlu ditingkatkan kembali seperti penempatan posisi pegawai disesuaikan dengan latar belakang pendidikannya, paling tidak memiliki pengalaman di bidang akuntansi agar dapat mengurangi kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Dalam hal ini apabila pengelolaan Sumber Daya Manusia sudah baik maka akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Karena apabila sumber daya tidak memiliki latar belakang yang sesuai dan pengalaman yang memadai maka akan kesulitan dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan.

4.2.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada BPKAD Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_2), diperoleh hasil sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan jawaban responden atas variabel (X_2) yang didominasi jawaban “Setuju (S)”, maka diperoleh kesimpulan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dikategorikan sangat kuat berdasarkan garis kontinum. Hal ini berarti masing-masing responden pada BPKAD Provinsi Jawa Barat telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan baik. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari 12 indikator yaitu PSAP 01 sampai dengan PSAP 12 yang disusun menjadi 18 pertanyaan yang mencakup:

1. (PSAP 01) Konsep Penyajian Laporan Keuangan

2. (PSAP 02) Konsep Laporan Ralisasi Anggaran
3. (PSAP 03) Konsep Laporan Arus Kas
4. (PSAP 04) Konsep Catatan Atas Laporan Keuangan
5. (PSAP 05) Konsep Akuntansi Persediaan
6. (PSAP 06) Akuntansi Investasi
7. (PSAP 07) Konsep Akuntansi Aset Tetap
8. (PSAP 08) Konsep Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. (PSAP 09) Konsep Akuntansi Kewajiban
10. (PSAP 10) Konsep Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan
11. (PSAP 11) Konsep Laporan Keuangan Konsolidasian
12. (PSAP 12) Konsep Laporan Operasional

Jika dilihat dari jawaban responden untuk beberapa pertanyaan masih menunjukkan adanya tanggapan responden yang menjawab netral pada pertanyaan variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, artinya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterapkan oleh BPKAD Provinsi Jawa Barat tergolong dalam kategori sangat baik, namun masih ada yang harus diperbaiki pada penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan seperti halnya pada suatu segmen yang dihentikan harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Yang berarti suatu segmen yang dihentikan pada tahun berjalan harus dilaporkan dalam laporan keuangan seolah-olah operasi tersebut berjalan sampai akhir tahun meskipun berjumlah nol. Sehingga meskipun suatu segmen atau operasi dihentikan akan tetap muncul pada laporan keuangan yang disajikan.

4.2.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD

Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap variabel kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), diperoleh hasil sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan jawaban responden atas variabel (Y) yang didominasi jawaban “Setuju (S)”, maka diperoleh kesimpulan bahwa kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikategorikan sangat kuat berdasarkan garis kontinum. Hal ini berarti Laporan Keuangan pada BPKAD Provinsi Jawa Barat memiliki kualitas yang sangat baik. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari 4 indikator yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami yang disusun dalam 13 pertanyaan.

Jika dilihat dari jawaban responden, untuk beberapa pertanyaan masih terdapat jawaban yang netral dan tidak setuju pada pertanyaan variabel kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, artinya meskipun kualitas Laporan Keuangan yang ditunjukkan oleh BPKAD Provinsi Jawa Barat tergolong dalam kategori sangat baik, namun kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih perlu ditingkatkan kembali seperti penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan ketentuan pada SAP. SAP sendiri merupakan prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan yang baik yaitu yang telah memenuhi 4 karakteristik laporan keuangan sesuai dengan PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah di antaranya adalah (i) Relevan, (ii) Andal, (iii) Dapat Dibandingkan dan (iv) Dapat Dipahami. Sehingga penyajian laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila penyusunannya sudah sesuai dengan SAP yang berlaku. Dari

hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas menyatakan bahwa keempat indikator yang merupakan karakteristik laporan keuangan sudah menunjukkan hasil yang sangat kuat sehingga laporan keuangan dapat dikatakan sudah baik meskipun penerapan SAP-nya belum cukup baik. LKPD dapat dikatakan baik meskipun penerapan SAP yang belum cukup baik apabila kualitas LKPD masih dalam batas wajar dan dapat diperbaiki sehingga BPK dapat memberikan toleransi.

4.2.4 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dan disajikan pada Tabel 4.21 menunjukan bahwa variabel kualitas Sumber Daya Manusia nilai signifikansi sebesar 0,063, nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,063 > 0,05$). Hipotesis ke-1 yang menyatakan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditolak. Hal ini menunjukan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil kuesioner bahwa kualitas Sumber Daya Manusia sudah baik dengan indikator pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Pada hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan kualitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diantaranya adalah latar belakang pendidikan non-akuntansi dan masa kerja para pegawai yang tergolong masih baru sehingga pengalaman dan pengetahuan dalam penyusunan laporan keuangan masih kurang memadai.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Kalumata, dkk (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

4.2.5 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dan disajikan pada Tabel 4.21 menunjukkan bahwa variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hipotesis ke-2 yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara parsial terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diterima. Maka dengan demikian penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara parsial terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil kuesioner, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sudah baik karena dapat memberikan kejelasan mengenai standar-standar akuntansi didalam pemerintahan yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa dengan adanya kejelasan SAP yang diterapkan, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena SAP yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan. Sehingga SAP merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas LKPD.

Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan

terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang *useful*. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP (Adhi dan Suhardjo, 2013:96).

Hasil penelitian mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Adhi dan Suhardjo (2013) yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2.6 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan uji F pada Tabel 4.22 menunjukkan bahwa angka signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Hipotesis ke-3 yang menyatakan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat.

Laporan keuangan yang andal berkaitan dengan sumber daya manusia yang menghasilkannya. Di sisi lain, sumber daya manusia yang berkualitas dapat

berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu dalam menyajikannya. Selain kualitas Sumber Daya Manusia, dengan diterapkannya SAP maka akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Karena SAP digunakan sebagai dasar acuan dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Pujanira dan Taman (2017) yang menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil mengenai pengaruh kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat:
 - a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas Sumber Daya Manusia pada BPKAD Provinsi Jawa Barat sudah sangat baik, karena sumber daya manusia yang berkualitas mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pula. Hal ini dapat dilihat dari hasil responden dalam penelitian sebesar 85,24%.
 - b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada BPKAD Provinsi Jawa Barat sudah sangat baik, karenasemakin baik tingkat penerapan SAP yang dilakukan pemerintah daerah maka akan berdampak positif pada kualitas LKPD. Hal ini dapat dilihat dari hasil responden dalam penelitian sebesar 85,77%.
 - c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat sudah sangat baik,

karena penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan karakteristik laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Hal ini dapat dilihat dari hasil responden dalam penelitian sebesar 87%.

2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial kualitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat.
3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat.
4. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai peran yang cukup besar atas peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas, dapat dilihat bahwa kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki peran penting dan pengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, peneliti memberikan beberapa saran untuk menjadi bahan pertimbangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebaiknya penempatan posisi untuk para pegawai disesuaikan dengan latar pendidikannya masing-masing, terutama dalam bidang keuangan diharapkan memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi agar dapat meminimalisir kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dan sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu alangkah baiknya jika diadakan pelatihan rutin bagi para pegawai untuk meningkatkan kemampuannya dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
2. Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, sebaiknya kepala instansi melakukan sosialisasi lebih mendalam mengenai SAP agar para pegawai yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dapat memahami lebih baik lagi mengenai SAP sehingga laporan keuangan dapat disajikan dengan baik dan sesuai dengan standar yang digunakan saat ini, yaitu PP No.71 Tahun 2010.
3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan serta menambahkan data penelitian, terutama pada variabel independen yang tidak berpengaruh (Kualitas Sumber Daya Manusia) agar hasil penelitian dapat sejalan dengan teori yang disajikan, seperti menambah jumlah responden dalam penelitian atau memperbaiki pertanyaan dalam kuesioner. Selain menyebarkan kuesioner, peneliti selanjutnya dapat juga melakukan survei melalui wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab pertanyaan yang disajikan. Dan diharapkan pada penelitian selanjutnya juga menambahkan subjek penelitian, agar tidak hanya terfokus pada satu Instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, D.K., dan Suhardjo, Y. (2013), Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tual), *Jurnal STIE Semarang*, Vol.5 No.3, hlm 96.
- Alamsyah, M.R., Rahayu, S. dan Muslih, M. (2017), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok, *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol.15 No.2, hlm 207.
- Anggito, A., dan Setiawan, J. (2018), *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak.
- Anshori, M., dan Iswati, S. (2017), *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Astuti, C.C. (2017), Analisis Korelasi untuk Mengetahui Keeratan Hubungan antara Keaktifan Mahasiswa dengan Hasil Belajar Akhir, *Journal of Information and Computer Technology Education*, Vol.1 No.1, hlm 4.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2019 (IHPS I 2019)*. <http://www.bpk.go.id/>, diunduh pada tanggal 26 Februari 2020.
- Cahyono, T. (2018), *Statistika Terapan & Indikator Kesehatan*, Sleman: CV Budi Utama.
- Chairunnisa, S., Marpaung, F.K., dan Rangkuti, D.A. (2020), Pengaruh Insentif, Komunikasi dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja pada Pt Sinar Graha Indonusa, *Jurnal Warta*, Vol.14 No.1, hlm 7.
- Devy, S. (2017), *New Edition Pocket Book IPS & PKN SMP/MTs Kelas VII, VIII, & IX*, Jakarta Selatan: Cmedia.
- Fitrah, M., dan Luthfiyah, (2017), *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak.
- Forma, F.Y., dan Amanah, L. (2018), Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebagai Variabel Pemoderasi, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol.7 No.11, hlm 7.

- Herlina, V. (2019), *Panduan Praktis Mengolah Data Kuesioner Menggunakan SPSS*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hermawan, I. (2019), *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode*, Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan.
- <https://bandung.bpk.go.id/>, diunduh tanggal 13 Februari 2020.
- <http://bpkad.jabarprov.go.id/>, diunduh tanggal 7 Mei 2020.
- <https://jabar.sindonews.com/>, diunduh tanggal 5 April 2020.
- <https://jabar.tribunnews.com/>, diunduh tanggal 5 September 2020.
- <https://news.detik.com/>, diunduh tanggal 5 April 2020.
- <https://www.ayobandung.com/read/2019>, diunduh tanggal 5 April 2020.
- <https://www.faktabandungraya.com/>, diunduh tanggal 2 Maret 2020.
- <https://www..pikiran-rakyat.com/>, diunduh tanggal 25 Februari 2020.
- Idris, A. (2016), *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Sleman: Deepublish.
- Indra, I.M.P. dan Cahyaningrum, I. (2019), *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, Sleman: CV Budi Utama.
- Ismail, F. (2018), Manajemen Berbasis Sekolah: Solusi Peningkatan Kualitas Pendidikan, *Jurnal Ilmiah Iqra'*, Vol.5 hlm.2.
- Kalumata, M.C.T., Ilat, V., dan Warongan, J.D.L. (2016), Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Reviu Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal Accountability*, Vol.5 No.2, hlm 163.
- Kanita, G.G. (2014), Pengaruh Struktur Aktiva dan Profitabilitas terhadap Struktur Modal Perusahaan Makanan dan Minuman, *Jurnal Ekonomi Trikonomika*, Vol.13 No.2, hlm 130.
- Kiranayanti, I.A.E., dan Erawati, N.M.A. (2016), Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.16 No.2, hlm 1290.
- Kumalasari, D. dan Riduwan, A. (2018), Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.7 No.1, hlm 9-11.

- Kurniawan, I.S. (2019), Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, *Jurnal Ekonomi & Manajemen*, Vol.16 No.2, hlm 161.
- Maksyur, N.V. (2015), Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Skpd Kabupaten Indragiri Hulu), *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol.2 No.2, hlm 13.
- Martoredjo, N.K. (2015), Peran Dimensi Mentoring Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, *Jurnal Humaniora*, Vol.6 No.4, hlm 447.
- Ningsih, S. dan Dukalang, H. (2019), Penerapan Metode Suksesif Interval pada Analisis Regresi Linier Berganda, *Jurnal of Mathematics*, Vol.1 No.1, hlm 45.
- Nurdin, I., dan Hartati, S. (2019), *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia,
- Pandiangan, A.P.B. (2019), *Penelitian Tindakan Kelas (Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran, Profesionalisme Guru dan Kompetensi Belajar Siswa)*, Sleman: Deepublish.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pujanira, P. dan Taman, A. (2017), Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY, *Jurnal Nominal*, Vol.6 No.2, hlm 25.
- Rahmawati, A., Mustika, I.W. dan Eka L.H. (2018), Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, Vol.20 No.2, hlm 16.
- Riniwati, H. (2016), *Manajemen Sumberdaya Manusia: Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM*, Malang: UB Press.

- Riyanto, S., dan Hatmawan, A.A. (2020), *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, Sleman: CV Budi Utama.
- Rosalin, S. (2017), *Manajemen Arsip Dinamis*, Malang: UB Press.
- Ruhana, I. (2012), Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Vs Daya Saing Global, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 6 No.1, hlm 53.
- Samsuni, (2017), Manajemen Sumber Daya Manusia, *Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.17 No.1, hlm 113.
- Sarmanu, (2017), *Dasar Metodologi Penelitian*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Sekaran, U. dan Bougie, R. (2017), *Metode Penelitian untuk Bisnis*, ed.6, Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Shatu, Y.P. (2016), *Kuasai Detai Akuntansi Laba & Rugi*, Jakarta: Pustaka Ilmu Semesta.
- Siahaan, A. (2016), Strategi Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol.1 No.1, hlm 6.
- Silviani, I. (2020), *Komunikasi Organisasi*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Sochib, (2018), *Buku Ajar Pengantar Akuntansi*, Sleman: Deepublish.
- Sugiyono. (2017). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Susan, E. (2019), Manajemen Sumber Daya Manusia, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.9 No.2, hlm 954.
- Tanjung, H.S., dan Nababan, S.A. (2016), Pengaruh Penggunaan Metode Pembelajaran Bermain terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Materi Pokok Pecahan di Kelas III SD Negeri 200407 Hutapadang, *Jurnal Bina Gogik*, Vol.3 No.1. hlm 39.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Walujo, D.A., Koesdijati, T., dan Utomo, Y. (2020), *Pengendalian Kualitas*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Wardani, D.K., dan Andriyani, I. (2017), Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten, *Jurnal Akuntansi*, Vol.5 No.2, hlm 89.

- Yosefrinaldi, (2013), Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat), *Jurnal Akuntansi*, Vol.1 No.1, hlm 5.
- Zeyn, E. (2011), Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi, *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1 No.1, hlm 24.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PT. BANK JABAR BANTEN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI EKUITAS

MAGISTER MANAJEMEN	(S2) TERAKREDITASI B	NO. 1583/SK/BAN-PT/AKred/M/V/2017
MANAJEMEN	(S1) TERAKREDITASI B	NO. 4025/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019
AKUNTANSI	(S1) TERAKREDITASI A	NO. 5100/SK/BAN-PT/AKred/S/XII/2017
PERBANKAN DAN KEUANGAN	(D3) TERAKREDITASI A	NO. 1454/SK/BAN-PT/AKred/Dipl-III/V/III/2016
AKUNTANSI	(D3) TERAKREDITASI A	NO. 1607/SK/BAN-PT/AKred/Dipl-III/V/III/2016

Kampus : Jl. PHH. Mustopa No. 31 Bandung 40124 Telp. 02270778332 Fax. 0227204597
Website : <http://ekuitas.ac.id>

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
(STIE) EKUITAS**

Nomor :

Tentang

**PENETAPAN PEMBIMBING PENYUSUNAN
DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA STIE EKUITAS
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS :

- Membaca : Pengajuan Usulan Penelitian mahasiswa STIE EKUITAS sebagai syarat untuk penyelesaian Ujian Sarjana Ekonomi STIE EKUITAS
- Menimbang : a. Bahwa dalam proses penelitian ilmiah calon Sarjana Ekonomi diperlukan pembimbing,
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Ketua,
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Mendikbud No. 12/D/0/1998 tentang Pemberian Status.
4. Keputusan Mendikbud No. 234/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Keputusan Mendiknas No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi.
6. Surat Keputusan YKP PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten No. 4/SK/P/YKP-bjb/I/2019 tentang Statuta STIE EKUITAS
7. Surat Keputusan YKP PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten No. 98/SK/YKP-bjb/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua STIE EKUITAS
- Memperhatikan : Laporan Ketua Program Studi S1 Akuntansi perihal Daftar Usulan Calon Pembimbing Skripsi.



YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PT. BANK JABAR BANTEN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI EKUITAS

MAGISTER MANAJEMEN	(S2) TERAKREDITASI B	NO. 1583/SK/BAN-PT/AKred/M/V/2017
MANAJEMEN	(S1) TERAKREDITASI B	NO. 4025/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019
AKUNTANSI	(S1) TERAKREDITASI A	NO. 5100/SK/BAN-PT/AKred/S/XII/2017
PERBANKAN DAN KEUANGAN	(D3) TERAKREDITASI A	NO. 1454/SK/BAN-PT/AKred/Dipl-III/VIII/2016
AKUNTANSI	(D3) TERAKREDITASI A	NO. 1607/SK/BAN-PT/AKred/Dipl-III/VIII/2016

Kampus : Jl. PHH. Mustopa No. 31 Bandung 40124 Telp. 02270778332 Fax. 0227204597
Website : <http://ekuitas.ac.id>

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi Mahasiswa STIE EKUITAS Program Studi S1 Akuntansi Tahun Akademik 2019/2020
- Pertama : Mengangkat dan Menetapkan nama-nama dosen yang tercantum pada kolom 4 dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing dengan nama mahasiswa bimbingannya yang terdapat pada kolom 2.
- Kedua : Masa bimbingan Skripsi untuk setiap mahasiswa terhitung selama 4 (empat) bulan terhitung mulai berlakunya SK ini.
- Ketiga : Kepada para Dosen Pembimbing agar dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, sesuai pedoman.
- Keempat : Kepada para Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan Keuangan yang berlaku di STIE EKUITAS.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan sejak tanggal ditetapkannya.
- Keenam : Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada para Pembimbing yang bertugas.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam SK ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 01 April 2020

Ketua,

Dr.rer.nat.. Martha Fani Cahyandito, , SE., M.Sc., CSP.

No	NIM / Nama Mahasiswa	Judul Tugas Akhir / Skripsi	Pembimbing
53	C10160319 NADIAH NURUL RIFDAH	Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor dan Mekanisme Corporate Governance terhadap integritas laporan keuangan.	Hery Syaerul Homan, S.Pd., M.Pd., M.Ak
54	C10160327 WIDI ANDINI	Pengaruh Integritas Auditor dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kinerja Auditor Internal	Hery Syaerul Homan, S.Pd., M.Pd., M.Ak
55	C10169320 GUFRONAL MARKSHELAFI	Pengaruh Sistem Kriptografi dan Teknologi Artificial Intellegence (AI) Terhadap Keamanan Sistem Informasi Akuntansi dalam Transaksi Digital Pada Aplikasi Bukalapak	Bimbim Maghriby, SE., M.Ak., Ak. BKP
56	C10160324 MERRY CHRISTIN SITANGGANG	PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KEPUASAN PENGGUNA TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	Yane Devi Anna, SE., M.Si., Ak, CA
57	C10160186 DEWA AYU AGUNG MONICA AGUSTINE	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat	DR. Dr. H. Usdi Suryana, SE, MM, Ak.,CA, SE.,MM.,Ak.,CA
58	C10160219 STEVANUS JONATHAN	Pengaruh Profitabilitas Perusahaan, Reputasi KAP, Dan Opini Auditor Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018)	Dr.. Hanifah, SE., Ak., M.Si., CA., QIA., CACP

**FORMULIR PENGAJUAN PENULISAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**

NAMA : DEWA AYU AGUNG M. A.
NPM : C10160186

**KONSENTRASI:
AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK**

JUDUL SKRIPSI YANG DIAJUKAN :

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat



SARAN DAN MASUKAN DARI DOSEN PEMBIMBING KONSENTRASI:

Car. f. w. n. - H. S. 804

JUDUL SKRIPSI YANG DISETUJUI PEMBIMBING KONSENTRASI:

**Menyetujui,
Dosen Konsultasi Konsentrasi**

(Dr. H. Usdi Suryana, SE, MM, Ak.,CA)

Bandung, 03 Maret 2020

Ketua Program Studi S1 Akuntansi ,

(Dwi Puryati, SE., M.Si. Ak., CA.)

Yang Mengajukan,

(Dewa Ayu Agung Monica A.)

Kuesioner ini terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Data Responden dan Pertanyaan mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berilah tanda silang (X) atau *checklist* (✓) pada jawaban yang dianggap paling sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr(i) pada setiap butir pertanyaan yang telah disajikan.

1. STS (Sangat Tidak Setuju)
2. TS (Tidak Setuju)
3. N (Netral)
4. S (Setuju)
5. SS (Sangat Setuju)

1. Nama : _____

2. Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita

3. Usia : _____ tahun

4. Pendidikan Terakhir : ☐ SMA/Sederajat ☐
Diploma/Akademi ☐ ☐ ☐
S1 S2 S3

5. Latar Belakang Pendidikan : ☐ Akuntansi ☐ Non Akuntansi

6. Masa Bekerja : ☐ 1 - 10 tahun ☐ 11 - 20 tahun
☐ 21 - 30 tahun ☐ >30 tahun

C. Daftar Pertanyaan

1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No.	Uraian Pertanyaan	Jawaban				
A	Relevan	SS	S	N	TS	STS
1.	Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan informasi yang lengkap mencakup semua informasi akuntansi.					
2.	Informasi dalam Laporan Keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian masa datang (<i>predictive value</i>).					
3.	Informasi dalam Laporan Keuangan dapat digunakan untuk mengkoreksi keputusan pengguna di masa lalu (<i>feedback value</i>).					
4.	Laporan Keuangan disajikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.					
B	Andal	SS	S	N	TS	STS
5.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan transaksi dan peristiwa yang aktual.					
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan tidak menyesatkan.					
7.	Informasi yang disajikan teruji kebenarannya.					
8.	Informasi yang dihasilkan telah memenuhi kebutuhan para pengguna.					
9.	Informasi yang dihasilkan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu.					
C	Dapat Dibandingkan	SS	S	N	TS	STS

10.	Informasi dalam Laporan Keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
11.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dari tahun ke tahun.					
D	Dapat Dipahami	SS	S	N	TS	STS
12.	Laporan Keuangan disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami.					
13.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan disesuaikan dengan pemahaman para pengguna.					

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

No.	Uraian Pertanyaan	Jawaban				
A	Pendidikan	SS	S	N	TS	STS
1.	Memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi agar lebih mudah dalam menyusun Laporan Keuangan.					
2.	Membaca jurnal-jurnal dan buku-buku akuntansi secara rutin dapat memperluas pengetahuan di bidang akuntansi.					
3.	Penempatan posisi pegawai disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.					
B	Pelatihan	SS	S	N	TS	STS
4.	Mengikuti pelatihan di bidang akuntansi dapat menunjang kemampuan bekerja di bidang akuntansi.					

5.	Memahami materi yang diberikan pada saat pelatihan dapat memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan.					
6.	Materi pelatihan yang relevan dan sejalan dengan kebutuhan sebagai pengelola keuangan.					
C	Pengalaman	SS	S	N	TS	STS
7.	Pegawai yang akan menjalankan tugas dalam pengelolaan keuangan biasanya memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi.					
8.	Pegawai yang berpengalaman dalam bidang akuntansi dapat mengurangi kesalahan dalam pengelolaan keuangan.					

3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

No.	Uraian Pertanyaan	Jawaban				
A	PSAP 01 (Penyajian Laporan Keuangan)	SS	S	N	TS	STS
1.	Laporan Keuangan yang disajikan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.					
B	PSAP 02 (Laporan Realisasi Anggaran)	SS	S	N	TS	STS
2.	Laporan Ralisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan.					
C	PSAP 03 (Laporan Arus Kas)	SS	S	N	TS	STS
3.	Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi,					

	investasi, pendanaan, dan transitoris.					
D	PSAP 04 (Catatan atas Laporan Keuangan)	SS	S	N	TS	STS
4.	Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis serta mengungkapkan penjelasan pos-pos laporan keuangan.					
E	PSAP 05 (Akuntansi Persediaan)	SS	S	N	TS	STS
5.	Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima dan/atau kepemenguasaannya berpindah.					
6.	Menyesuaikan catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi.					
F	PSAP 06 (Akuntansi Investasi)	SS	S	N	TS	STS
7.	Investasi dapat diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh.					
G	PSAP 07 (Akuntansi Aset Tetap)	SS	S	N	TS	STS
8.	Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas					
9.	Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.					

H	PSAP 08 (Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan)	SS	S	N	TS	STS
10.	Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.					
I	PSAP 09 (Akuntansi Kewajiban)	SS	S	N	TS	STS
11.	Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.					
J	PSAP 10 (Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan)	SS	S	N	TS	STS
12.	Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas.					
13.	Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.					
14.	Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.					
15.	Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.					

16.	Suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan.					
K	PSAP 11 (Laporan Keuangan Konsolidasian)	SS	S	N	TS	STS
17.	Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.					
L	PSAP 12 (Laporan Operasional)	SS	S	N	TS	STS
18.	Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.					

Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Latar Belakang Pendidikan	Masa Bekerja	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	TOTAL Y
Pria	39	S2	Non Akuntansi	11 - 20 tahun	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	47
Pria	58 thn	S2	Non Akuntansi	> 30 tahun	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	61
Pria	38	S1	Akuntansi	11 - 20 tahun	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	51
Pria	29	S1	Akuntansi	1 - 10 tahun	5	4	4	4	5	4	3	3	4	5	5	4	4	54
Wanita	22 tahun	S1	Akuntansi	1 - 10 tahun	2	5	5	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	50
Wanita	24	S1	Akuntansi	1 - 10 tahun	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	56
Wanita	23	S1	Akuntansi	1 - 10 tahun	5	4	4	5	5	3	3	3	5	5	5	5	3	55
Wanita	35 Tahun	S1	Akuntansi	1 - 10 tahun	4	4	3	5	4	4	4	4	5	4	5	3	4	53
Wanita	38	S2	Non Akuntansi	11 - 20 tahun	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	60
Wanita	47	S1	Akuntansi	1 - 10 tahun	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	53
Wanita	30 tahun	S1	Non Akuntansi	1 - 10 tahun	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	63
Wanita	33	S1	Akuntansi	1 - 10 tahun	4	4	4	5	3	4	4	4	5	5	4	5	5	56
Wanita	39	S2	Akuntansi	11 - 20 tahun	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	63
Wanita	33	S2	Akuntansi	1 - 10 tahun	5	4	3	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	57
Pria	52 tahun	S1	Non Akuntansi	11 - 20 tahun	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	54
Pria	40 thn 7 bl	Diploma/Akademi	Akuntansi	11 - 20 tahun	5	3	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	52
Wanita	44	S1	Akuntansi	11 - 20 tahun	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
Wanita	26	S1	Non Akuntansi	1 - 10 tahun	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	57
Pria	46	S1	Akuntansi	21 - 30 tahun	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	64
Pria	51	S1	Akuntansi	11 - 20 tahun	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	64
Pria	43	Diploma/Akademi	Non Akuntansi	21 - 30 tahun	5	4	4	5	2	5	5	4	5	5	5	5	5	59
Pria	31	S1	Non Akuntansi	1 - 10 tahun	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	3	5	5	62
Pria	29 Tahun	S1	Akuntansi	1 - 10 tahun	4	4	5	5	4	4	5	4	4	3	5	5	5	57
Pria	34	S1	Akuntansi	1 - 10 tahun	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	3	4	3	50
Pria	27 Tahun	S1	Akuntansi	1 - 10 tahun	5	4	5	4	3	5	5	4	4	4	4	5	4	56
Pria	31	S1	Akuntansi	1 - 10 tahun	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	3	4	3	50
Wanita	26	S1	Akuntansi	1 - 10 tahun	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	48
Wanita	27	S1	Akuntansi	1 - 10 tahun	4	4	3	4	4	4	5	4	3	3	4	3	3	48
Pria	26	S1	Non Akuntansi	1 - 10 tahun	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	64
Pria	30	S2	Akuntansi	1 - 10 tahun	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
Pria	54	S2	Akuntansi	21 - 30 tahun	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	58
				TOTAL	141	131	126	140	128	137	140	128	140	137	138	138	128	1752

X1(1)	X1(2)	X1(3)	X1(4)	X1(5)	X1(6)	X1(7)	X1(8)	TOTAL X1	X2(1)	X2(2)	X2(3)	X2(4)	X2(5)	X2(6)	X2(7)	X2(8)	X2(9)	X2(10)	X2(11)	X2(12)	X2(13)	X2(14)	X2(15)	X2(16)	X2(17)	X2(18)	TOTAL X2
4	4	3	4	4	4	3	3	29	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	63
5	5	5	5	5	5	5	4	39	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	88
5	4	5	4	4	4	5	5	36	5	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	70
4	4	4	4	4	4	5	3	32	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	80
4	3	3	4	4	4	3	3	28	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	65
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	74
3	4	2	4	5	4	2	1	25	3	4	4	5	4	5	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	73
4	4	5	5	4	4	4	3	33	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	66
5	4	5	5	4	5	5	5	38	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	85
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	73
4	4	5	5	3	4	3	3	31	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	81
5	5	4	5	5	5	4	4	37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90
5	5	5	5	5	5	5	4	38	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	83
4	5	4	4	4	4	4	5	34	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	83
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	77
4	4	4	4	5	5	4	3	33	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	74
5	5	4	5	5	5	4	5	38	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	3	77
5	5	5	5	5	5	5	5	40	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	75
4	5	5	5	5	5	5	5	39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	82
5	4	4	5	5	4	5	4	36	4	4	4	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	79
5	5	5	5	5	5	4	3	37	5	4	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	79
4	4	5	3	4	4	3	5	32	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	3	4	4	75
3	3	3	3	5	4	3	3	27	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	5	4	3	4	4	3	4	4	71
5	5	4	4	5	4	5	5	37	4	5	4	4	5	5	5	4	5	4	4	5	4	3	4	4	4	4	77
3	3	3	4	4	3	3	4	27	4	3	3	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	68
4	5	4	4	4	3	3	4	31	4	3	3	3	3	3	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	66
3	4	5	5	5	4	4	4	34	5	5	4	3	3	4	4	5	4	3	4	4	3	3	3	4	4	5	70
5	4	4	5	4	4	5	5	36	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	88
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90
5	5	4	5	4	5	3	3	34	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	81
134	134	131	139	138	133	124	124	1057	134	134	131	137	129	134	136	133	131	130	136	134	135	131	132	128	132	136	2393

Successive Interval													Successive Interval									
Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	TOTAL Y	XI(1)	XI(2)	XI(3)	XI(4)	XI(5)	XI(6)	XI(7)	XI(8)	Total XI
2.364	2.886	1.000	1.000	1.986	2.350	2.208	2.447	2.208	1.000	2.137	2.137	1.000	24.725	2.189	2.317	1.904	2.257	2.565	2.530	2.253	2.193	18.207
3.864	2.886	1.000	3.362	4.289	3.778	3.627	3.883	3.627	3.543	3.493	3.493	2.244	43.688	3.508	3.702	4.172	3.676	4.064	4.003	4.289	3.156	30.569
3.864	2.886	2.167	2.468	3.023	2.350	2.208	1.000	2.208	2.183	2.137	2.137	1.000	29.633	3.508	2.317	4.172	2.257	2.565	2.530	4.289	4.289	25.926
3.864	2.886	2.167	2.468	4.289	2.350	1.000	1.000	2.208	3.543	3.493	2.137	2.244	33.649	2.189	2.317	2.891	2.257	2.565	2.530	4.289	2.193	21.230
3.864	4.492	3.364	2.468	1.986	2.350	2.208	2.447	1.000	2.183	2.137	2.137	2.244	32.882	2.189	1.000	1.904	2.257	2.565	2.530	2.253	2.193	16.890
3.864	2.886	2.167	2.468	3.023	3.778	3.627	3.883	3.627	2.183	2.137	2.137	2.244	38.025	2.189	2.317	2.891	2.257	2.565	2.530	3.198	3.156	21.103
3.864	2.886	2.167	3.362	4.289	1.000	1.000	1.000	3.627	3.543	3.493	3.493	1.000	35.323	1.000	2.317	1.000	2.257	4.064	2.530	1.000	1.000	15.167
3.864	2.886	1.000	3.362	3.023	2.350	2.208	2.447	3.627	2.183	3.493	1.000	2.244	34.288	2.189	2.317	4.172	3.676	2.565	2.530	3.198	2.193	22.839
3.864	2.886	2.167	3.362	3.023	3.778	3.627	2.447	3.627	3.543	3.493	3.493	2.244	42.153	3.508	2.317	4.172	3.676	2.565	4.003	4.289	4.289	28.819
3.864	2.886	2.167	2.468	3.023	2.350	2.208	2.447	2.208	2.183	2.137	2.137	2.244	32.324	2.189	2.317	2.891	2.257	2.565	2.530	3.198	3.156	21.103
3.864	2.886	3.364	3.362	4.289	3.778	3.627	2.447	3.627	3.543	3.493	3.493	3.530	45.903	2.189	2.317	4.172	3.676	1.000	2.530	2.253	2.193	20.329
3.864	2.886	2.167	3.362	1.986	2.350	2.208	2.447	3.627	3.543	2.137	3.493	3.530	38.201	3.508	3.702	2.891	3.676	4.064	4.003	3.198	3.156	28.198
3.864	4.492	3.364	3.362	4.289	3.778	3.627	2.447	3.627	3.543	3.493	3.493	2.244	46.222	3.508	3.702	4.172	3.676	4.064	4.003	3.198	3.156	29.479
3.864	2.886	1.000	2.468	3.023	3.778	3.627	2.447	3.627	3.543	3.493	2.137	2.244	38.137	2.189	3.702	2.891	2.257	2.565	2.530	3.198	4.289	23.621
3.864	2.886	2.167	2.468	3.023	2.350	3.627	3.883	2.208	2.183	2.137	2.137	2.244	35.179	2.189	2.317	2.891	2.257	2.565	2.530	3.198	3.156	21.103
3.864	1.000	2.167	2.468	1.986	2.350	2.208	2.447	2.208	2.183	3.493	2.137	2.244	30.756	2.189	2.317	2.891	3.676	4.064	2.530	2.253	3.156	23.075
3.864	4.492	3.364	3.362	4.289	3.778	3.627	3.883	3.627	3.543	3.493	3.493	3.530	48.944	3.508	3.702	2.891	3.676	4.064	4.003	3.198	4.289	29.331
3.864	2.886	2.167	3.362	3.023	2.350	2.208	2.447	3.627	3.543	3.493	3.493	2.244	39.307	3.508	3.702	4.172	3.676	4.064	4.003	4.289	4.289	31.702
3.864	4.492	3.364	3.362	3.023	3.778	3.627	3.883	3.627	3.543	3.493	3.493	3.530	47.679	2.189	3.702	4.172	3.676	4.064	4.003	4.289	4.289	30.383
3.864	4.492	2.167	3.362	4.289	3.778	3.627	3.883	3.627	3.543	3.493	3.493	3.530	47.747	3.508	3.702	4.172	3.676	4.064	4.003	4.289	4.289	31.702
3.864	2.886	2.167	3.362	1.000	3.778	3.627	2.447	3.627	3.543	3.493	3.493	3.530	41.417	3.508	2.317	2.891	3.676	4.064	2.530	4.289	3.156	26.431
3.864	4.492	3.364	3.362	4.289	3.778	3.627	2.447	3.627	3.543	1.000	3.493	3.530	45.016	3.508	3.702	4.172	3.676	4.064	4.003	3.198	2.193	28.515
3.864	2.886	3.364	3.362	3.023	2.350	3.627	2.447	2.208	1.000	3.493	3.493	3.530	39.248	2.189	2.317	4.172	1.000	2.565	2.530	2.253	4.289	21.314
3.864	2.886	1.000	2.468	3.023	2.350	2.208	2.447	3.627	2.183	1.000	2.137	1.000	30.195	1.000	1.000	1.904	1.000	4.064	2.530	2.253	2.193	15.943
3.864	2.886	3.364	2.468	1.986	3.778	3.627	2.447	2.208	2.183	2.137	3.493	2.244	36.686	3.508	3.702	2.891	2.257	4.064	2.530	4.289	4.289	27.529
3.864	2.886	1.000	2.468	3.023	2.350	2.208	2.447	3.627	2.183	1.000	2.137	1.000	30.195	1.000	1.000	1.904	2.257	2.565	1.000	2.253	3.156	15.135
3.864	2.886	1.000	2.468	3.023	1.000	2.208	1.000	2.208	2.183	2.137	1.000	2.244	27.222	2.189	3.702	2.891	2.257	2.565	1.000	2.253	3.156	20.013
3.864	2.886	1.000	2.468	3.023	2.350	3.627	2.447	1.000	1.000	2.137	1.000	1.000	27.804	1.000	2.317	4.172	3.676	4.064	2.530	3.198	3.156	24.112
3.864	4.492	3.364	3.362	4.289	3.778	3.627	3.883	2.208	3.543	3.493	3.493	3.530	47.525	3.508	2.317	2.891	3.676	2.565	2.530	4.289	4.289	26.065
3.864	4.492	3.364	3.362	4.289	3.778	3.627	3.883	3.627	3.543	3.493	3.493	3.530	48.944	3.508	3.702	4.172	3.676	4.064	4.003	4.289	4.289	31.702
3.864	2.886	2.167	3.362	4.289	3.778	3.627	2.447	2.208	2.183	2.137	3.493	2.244	39.285	3.508	3.702	2.891	3.676	2.565	4.003	2.253	2.193	24.791

Successive Interval																		TOTAL X2
X2(1)	X2(2)	X2(3)	X2(4)	X2(5)	X2(6)	X2(7)	X2(8)	X2(9)	X2(10)	X2(11)	X2(12)	X2(13)	X2(14)	X2(15)	X2(16)	X2(17)	X2(18)	
2.317	2.189	2.448	2.183	2.295	2.317	1.000	2.530	1.000	1.000	1.000	1.000	2.441	1.000	1.000	1.000	1.000	2.659	30.379
2.317	3.508	3.883	3.543	3.629	3.702	3.831	4.003	3.883	3.743	4.172	4.289	3.886	3.680	3.819	3.696	3.620	2.659	65.862
3.702	3.508	2.448	2.183	1.000	1.000	2.396	2.530	2.448	2.360	2.659	2.750	2.441	2.318	2.404	1.000	1.000	2.659	40.806
3.702	3.508	2.448	2.183	2.295	2.317	2.396	4.003	3.883	2.360	2.659	2.750	3.886	3.680	2.404	2.338	3.620	4.172	54.604
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.396	1.000	2.448	2.360	2.659	2.750	2.441	2.318	2.404	2.338	2.275	2.659	34.048
2.317	2.189	2.448	2.183	2.295	2.317	2.396	2.530	2.448	2.360	2.659	4.289	2.441	2.318	3.819	2.338	2.275	2.659	46.280
1.000	2.189	2.448	3.543	2.295	3.702	2.396	2.530	1.000	2.360	2.659	2.750	3.886	2.318	2.404	2.338	2.275	2.659	44.751
2.317	1.000	2.448	2.183	1.000	2.317	2.396	2.530	1.000	1.000	2.659	2.750	2.441	2.318	1.000	2.338	1.000	2.659	35.356
3.702	3.508	3.883	3.543	3.629	3.702	2.396	4.003	2.448	2.360	4.172	4.289	3.886	3.680	2.404	3.696	2.275	4.172	61.747
2.317	2.189	2.448	2.183	2.295	2.317	2.396	2.530	2.448	2.360	4.172	2.750	2.441	2.318	2.404	2.338	2.275	2.659	44.839
2.317	3.508	2.448	2.183	2.295	3.702	3.831	4.003	2.448	2.360	4.172	2.750	2.441	2.318	3.819	3.696	3.620	4.172	56.083
3.702	3.508	3.883	3.543	3.629	3.702	3.831	4.003	3.883	3.743	4.172	4.289	3.886	3.680	3.819	3.696	3.620	4.172	68.760
3.702	3.508	3.883	3.543	3.629	2.317	3.831	2.530	3.883	2.360	4.172	2.750	3.886	2.318	2.404	2.338	3.620	4.172	58.845
3.702	3.508	3.883	3.543	3.629	2.317	2.396	4.003	3.883	2.360	2.659	2.750	3.886	3.680	2.404	2.338	3.620	4.172	58.733
2.317	2.189	2.448	3.543	2.295	3.702	3.831	2.530	2.448	3.743	2.659	4.289	2.441	2.318	2.404	2.338	2.275	2.659	50.427
1.000	2.189	2.448	2.183	2.295	2.317	2.396	2.530	2.448	2.360	2.659	4.289	3.886	3.680	2.404	2.338	2.275	2.659	46.355
2.317	2.189	3.883	3.543	2.295	2.317	2.396	2.530	2.448	2.360	4.172	2.750	3.886	3.680	3.819	2.338	2.275	1.000	50.197
2.317	2.189	2.448	2.183	2.295	2.317	3.831	2.530	2.448	2.360	4.172	2.750	2.441	2.318	2.404	2.338	3.620	2.659	47.619
3.702	3.508	3.883	3.543	3.629	3.702	3.831	4.003	3.883	3.743	4.172	4.289	3.886	3.680	3.819	3.696	3.620	4.172	68.760
3.702	3.508	3.883	3.543	2.295	2.317	2.396	2.530	2.448	3.743	2.659	2.750	2.441	3.680	3.819	3.696	3.620	4.172	57.203
2.317	2.189	2.448	3.543	3.629	2.317	3.831	2.530	2.448	3.743	2.659	2.750	3.886	2.318	3.819	2.338	2.275	4.172	53.210
3.702	2.189	3.883	3.543	2.295	3.702	3.831	2.530	2.448	2.360	4.172	2.750	2.441	2.318	3.819	2.338	2.275	2.659	53.254
2.317	2.189	2.448	3.543	2.295	3.702	2.396	2.530	3.883	2.360	2.659	4.289	2.441	2.318	2.404	1.000	2.275	2.659	47.707
2.317	2.189	2.448	3.543	2.295	2.317	1.000	2.530	2.448	2.360	4.172	2.750	1.000	2.318	2.404	1.000	2.275	2.659	42.023
2.317	3.508	2.448	2.183	3.629	3.702	3.831	2.530	3.883	2.360	2.659	4.289	2.441	1.000	2.404	2.338	2.275	2.659	50.456
2.317	1.000	1.000	2.183	2.295	2.317	3.831	2.530	2.448	1.000	2.659	2.750	2.441	1.000	2.404	1.000	2.275	2.659	38.109
2.317	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.396	1.000	2.448	3.743	2.659	2.750	2.441	2.318	2.404	2.338	1.000	2.659	35.473
3.702	3.508	2.448	1.000	1.000	2.317	2.396	4.003	2.448	1.000	2.659	2.750	1.000	1.000	1.000	2.338	2.275	4.172	41.015
3.702	2.189	2.448	3.543	3.629	3.702	3.831	4.003	3.883	3.743	4.172	4.289	3.886	3.680	3.819	3.696	3.620	4.172	66.006
3.702	3.508	3.883	3.543	3.629	3.702	3.831	4.003	3.883	3.743	4.172	4.289	3.886	3.680	3.819	3.696	3.620	4.172	68.760
3.702	3.508	2.448	2.183	2.295	3.702	3.831	4.003	2.448	3.743	2.659	2.750	2.441	2.318	2.404	3.696	3.620	4.172	55.923

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Sumber Daya Manusia ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.821 ^a	.674	.651	4.194

a. Predictors: (Constant), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Sumber Daya Manusia

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1020.570	2	510.285	29.008	.000 ^b
	Residual	492.558	28	17.591		
	Total	1513.128	30			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Sumber Daya Manusia

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.482	4.003		2.119	.043		
	Kualitas Sumber Daya Manusia	.399	.206	.287	1.938	.063	.530	1.888

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	.391	.097	.597	4.033	.000	.530	1.888
--	------	------	------	-------	------	------	-------

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Collinearity Diagnostics^a

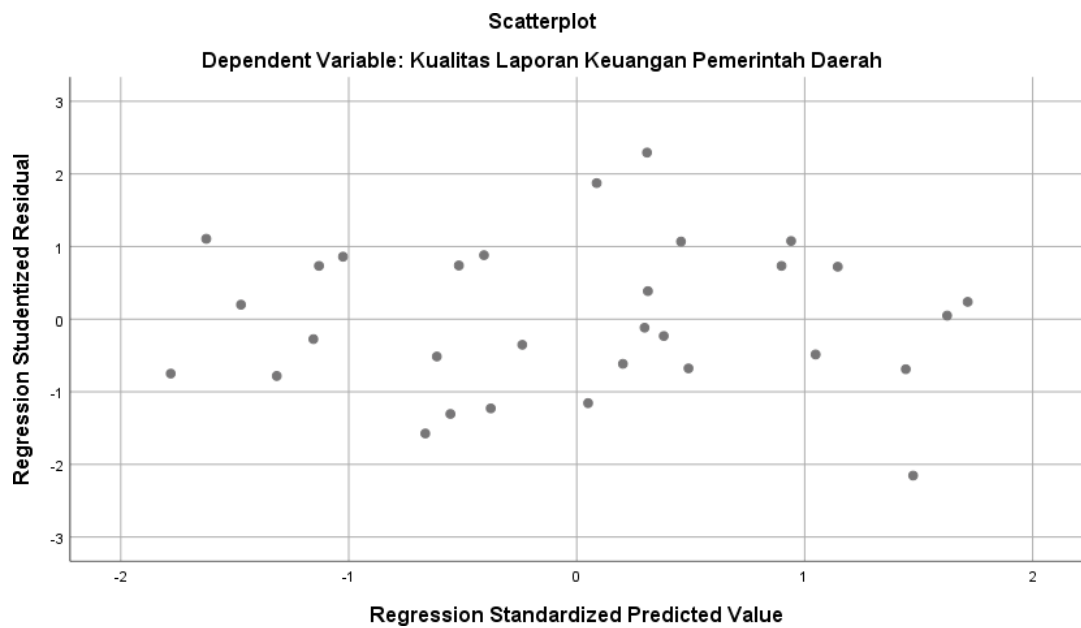
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	(Constant)	Variance Proportions	
					Kualitas Sumber Daya Manusia	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
1	1	2.963	1.000	.00	.00	.00
	2	.024	11.167	.99	.14	.18
	3	.013	15.033	.00	.86	.82

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	27.62	48.01	38.01	5.833	31
Std. Predicted Value	-1.781	1.715	.000	1.000	31
Standard Error of Predicted Value	.816	1.908	1.273	.290	31
Adjusted Predicted Value	27.93	47.90	38.00	5.876	31
Residual	-8.414	9.136	.000	4.052	31
Std. Residual	-2.006	2.178	.000	.966	31
Stud. Residual	-2.154	2.294	.002	1.019	31
Deleted Residual	-9.699	10.135	.014	4.508	31
Stud. Deleted Residual	-2.316	2.500	.004	1.054	31
Mahal. Distance	.169	5.242	1.935	1.271	31
Cook's Distance	.000	.236	.038	.057	31
Centered Leverage Value	.006	.175	.065	.042	31

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.05198818
Most Extreme Differences	Absolute	.113
	Positive	.077
	Negative	-.113
Test Statistic		.113
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Histogram

Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mean = -1.42E-15
Std. Dev. = 0.966
N = 31

Frequency

Regression Standardized Residual

Bin Range	Frequency
-2.0 to -1.5	1
-1.5 to -1.0	3
-1.0 to -0.5	1
-0.5 to 0.0	7
0.0 to 0.5	4
0.5 to 1.0	4
1.0 to 1.5	5
1.5 to 2.0	4
2.0 to 2.5	1
2.5 to 3.0	1

X1(3)	Pearson Correlation	.482**	.468**	1	.511**	.074	.501**	.581**	.489**	.724**
	Sig. (2-tailed)	.006	.008		.003	.691	.004	.001	.005	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X1(4)	Pearson Correlation	.550**	.500**	.511**	1	.308	.611**	.409*	.156	.702**
	Sig. (2-tailed)	.001	.004	.003		.092	.000	.022	.402	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X1(5)	Pearson Correlation	.225	.406*	.074	.308	1	.489**	.248	.160	.501**
	Sig. (2-tailed)	.223	.023	.691	.092		.005	.179	.391	.004
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X1(6)	Pearson Correlation	.658**	.614**	.501**	.611**	.489**	1	.434*	.249	.792**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.004	.000	.005		.015	.177	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X1(7)	Pearson Correlation	.642**	.387*	.581**	.409*	.248	.434*	1	.653**	.769**
	Sig. (2-tailed)	.000	.032	.001	.022	.179	.015		.000	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X1(8)	Pearson Correlation	.480**	.389*	.489**	.156	.160	.249	.653**	1	.636**
	Sig. (2-tailed)	.006	.030	.005	.402	.391	.177	.000		.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Total X1	Pearson Correlation	.819**	.768**	.724**	.702**	.501**	.792**	.769**	.636**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.004	.000	.000	.000	
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	31	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	31	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.863	8

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	31	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	31	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.932	18

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	31	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	31	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.892	13

		Correlations																		
		X2(1)	X2(2)	X2(3)	X2(4)	X2(5)	X2(6)	X2(7)	X2(8)	X2(9)	X2(10)	X2(11)	X2(12)	X2(13)	X2(14)	X2(15)	X2(16)	X2(17)	X2(18)	TOTAL X2
X2(1)	Pearson Correlation	1	.647**	.560**	.291	.328	.216	.259	.617**	.476**	.242	.284	.077	.128	.294	.196	.364*	.416*	.650**	.575**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.112	.072	.242	.159	.000	.007	.190	.121	.680	.493	.108	.290	.044	.020	.000	.001
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X2(2)	Pearson Correlation	.647**	1	.667**	.321	.504**	.410*	.246	.736**	.523**	.292	.261	.240	.268	.338	.251	.483**	.589**	.609**	.685**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.078	.004	.022	.182	.000	.003	.111	.156	.194	.145	.063	.173	.006	.000	.000	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X2(3)	Pearson Correlation	.560**	.667**	1	.730**	.618**	.472**	.201	.552**	.386*	.300	.506**	.271	.490**	.601**	.445*	.491**	.492**	.307	.743**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.000	.007	.278	.001	.032	.101	.004	.140	.005	.000	.012	.005	.005	.093	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X2(4)	Pearson Correlation	.291	.321	.730**	1	.708**	.585**	.238	.355*	.332	.426*	.443*	.350	.520**	.529**	.525**	.254	.408*	.173	.668**
	Sig. (2-tailed)	.112	.078	.000		.000	.001	.196	.050	.068	.017	.013	.054	.003	.002	.002	.169	.023	.353	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X2(5)	Pearson Correlation	.328	.504**	.618**	.708**	1	.617**	.481**	.542**	.620**	.447*	.435*	.476**	.657**	.429*	.514**	.462**	.616**	.437*	.808**
	Sig. (2-tailed)	.072	.004	.000	.000		.000	.006	.002	.000	.012	.014	.007	.000	.016	.003	.009	.000	.014	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X2(6)	Pearson Correlation	.216	.410*	.472**	.585**	.617**	1	.514**	.616**	.311	.324	.376*	.542**	.290	.212	.361*	.515**	.474**	.284	.662**
	Sig. (2-tailed)	.242	.022	.007	.001	.000		.003	.000	.089	.075	.037	.002	.114	.253	.046	.003	.007	.121	.000

X2(14)	Pearson Correlation	.294	.338	.601**	.529**	.429*	.212	.102	.423*	.441*	.579**	.474**	.444*	.700**	1	.567**	.603**	.530**	.285	.699**
	Sig. (2-tailed)	.108	.063	.000	.002	.016	.253	.586	.018	.013	.001	.007	.012	.000		.001	.000	.002	.121	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X2(15)	Pearson Correlation	.196	.251	.445*	.525**	.514**	.361*	.507**	.241	.445*	.681**	.562**	.439*	.448*	.567**	1	.550**	.535**	.171	.689**
	Sig. (2-tailed)	.290	.173	.012	.002	.003	.046	.004	.192	.012	.000	.001	.014	.011	.001		.001	.002	.357	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X2(16)	Pearson Correlation	.364*	.483**	.491**	.254	.462**	.515**	.520**	.575**	.331	.626**	.488**	.438*	.456**	.603**	.550**	1	.657**	.568**	.766**
	Sig. (2-tailed)	.044	.006	.005	.169	.009	.003	.003	.001	.069	.000	.005	.014	.010	.000	.001		.000	.001	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X2(17)	Pearson Correlation	.416*	.589**	.492**	.408*	.616**	.474**	.549**	.639**	.650**	.484**	.518**	.313	.417*	.530**	.535**	.657**	1	.602**	.808**
	Sig. (2-tailed)	.020	.000	.005	.023	.000	.007	.001	.000	.000	.006	.003	.087	.020	.002	.002	.000		.000	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X2(18)	Pearson Correlation	.650**	.609**	.307	.173	.437*	.284	.325	.651**	.411*	.334	.138	.129	.259	.285	.171	.568**	.602**	1	.598**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.093	.353	.014	.121	.075	.000	.022	.067	.458	.489	.159	.121	.357	.001	.000		.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
TOTAL X2	Pearson Correlation	.575**	.685**	.743**	.668**	.808**	.662**	.602**	.730**	.710**	.661**	.625**	.589**	.632**	.699**	.689**	.766**	.808**	.598**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Y12	Pearson Correlation	.519**	.387*	.644**	.702**	.305	.571**	.405*	.334	.454*	.612**	.369*	1	.578**	.801**
	Sig. (2-tailed)	.003	.032	.000	.000	.095	.001	.024	.067	.010	.000	.041		.001	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Y13	Pearson Correlation	.306	.466**	.646**	.647**	.173	.549**	.520**	.486**	.290	.513**	.430*	.578**	1	.772**
	Sig. (2-tailed)	.094	.008	.000	.000	.351	.001	.003	.006	.113	.003	.016	.001		.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
TOTAL Y	Pearson Correlation	.613**	.612**	.640**	.791**	.532**	.781**	.627**	.580**	.549**	.747**	.543**	.801**	.772**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.002	.000	.000	.001	.001	.000	.002	.000	.000	
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		Correlations		
		Kualitas Sumber Daya Manusia	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kualitas Sumber Daya Manusia	Pearson Correlation	1	.686**	.697**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	31	31	31
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	Pearson Correlation	.686**	1	.794**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	31	31	31
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pearson Correlation	.697**	.794**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	31	31	31

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel r untuk df = 1 - 50

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189
36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
49	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
50	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CURRICULUM VITAE

I. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Dewa Ayu Agung Monica Agustine
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Bandung, 17 Agustus 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Hindu
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Bojong Kacor No.40A RT.002 RW.014
Kel.Cibeunying Kec.Cimenyan Kab. Bandung
7. Nomor Telepon : 088229372350
8. E-mail : monicaagustine4@gmail.com



II. Riwayat Pendidikan Formal

Tahun	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Jurusan
2003 - 2009	SD	SDN Sukaluyu Bandung	-
2009 - 2012	SMP	SMP Negeri 27 Bandung	-
2012 – 2015	SMA	SMA Negeri 1 Bandung	IPA
2016 - 2020	S1	STIE Ekuitas	Akuntansi

III. Riwayat Pendidikan Non-Formal

Tahun	Keterangan
2019	Brevet Pajak A dan B Terpadu
2020	TOEFL, TOEIC, Speaking TBI